

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN JARINGAN GAS
RUMAH TANGGA DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu Sosial Program

Studi Administrasi Publik Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau



Eka Safitri Dolok Saribu

NPM: 167110423

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Eka Safitri Dolok Saribu
Npm : 167110423
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah
Tangga di Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat distujui untuk di sidangkan dalam ujian konfrehensif.

Pekanbaru, 25 November 2020

Turut Menyetujui
Program Studi Administrasi Publik

Pembimbing

Ketua,


Lilis Suryani, S.Sos., M.Si.


Evi Zubaidah, S.Sos.I., MPA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Eka Safitri Dolok Saribu
Npm : 167110423
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah
Tangga Di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswi bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 22 Desember 2020

Ketua,

An. Tim Penguji

Sekretaris,



Evi Zubaidah, S.Sos.I.,MPA



Andri Kurniawan, B.PM,M.Si

Turut Menyetujui,

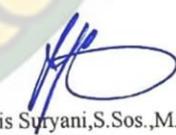
Pembantu Dekan I,

Program Studi Administrasi Publik,

Ketua,



Indra Safri,S.Sos.,M.Si



Lilis Suryani,S.Sos.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Eka Safitri Dolok Saribu
Npm : 167110423
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah
Tangga Di Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Konfrehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerima untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

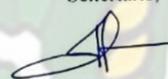
Pekanbaru, 22 Desember 2020

Ketua,



Evi Zubaidah, S.Sos.I.,MPA

Sekretaris,



Andri Kurniawan, B.PM, M.Si

Anggota,



Drs. Parjiyana, M.Si

Mengetahui,

Pembantu Dekan I,



Indra Safri, S.Sos.,M.Si

Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **“Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru”**, ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar sarjana stara satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaedah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi,SH.MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Indra Safri, S.Sos M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos.,M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Lilis Suriani, S.Sos.,M.Si selaku Penasehat Akedemik (PA).
5. Ibu Evi Zubaidah, S.Sos.I.,MPA selaku dosen pembimbing saya, saya telah membimbing saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan hari ini, mudah-mudahan ilmu yang Bapak dan Ibu berikan bermanfaat bagi semua orang dan diri penulis.
7. Terkhus dan sangat teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tiada terhingga,penulis persembahkan Kepada kedua orang tua Ayahhanda terkasih M. Doloksaribu dan Ibunda D. Samosir, serta kakak saya tersayang Erika Yuliana Doloksaribu, serta adik adik saya Saroha Doloksaribu dan Ferdi Siswanto Doloksaribu, serta keluarga besar yang tidak henti-hentinya mendoakan, dan tidak pernah lelah memberikan semangat dan motivasi dan dukungan secara moril maupun materil selama penulis melaksanakan studi.

8. Penulis juga berterima kasih kepada teman KTB “Lavina Berta” yang selalu memberikan motivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
9. Penulis juga berterimkasih kepada Josua Junardi Alexsandro Malau, yang selalu memberi semangat dan selalu membantu penulis dari awal mulai kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
10. Penulis juga berterima kasih kepada sahabat, Ardia Ravita Cahyani, Devi Fitri, Desi Pratiwi, Fauziah Zam dan lainnya yang tidak bisa penulis dapat sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Penulis Juga berterima kasih kepada teman sekelas atas waktu kebersamaan dan telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis bermohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan Rahmat dan Karunia yang setimpal Amin...

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup baik kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru,25 November 2020

Penulis

Eka Safitri DS

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF SKRIPSI.....	iii
SURAT KEPUTUSAN TIM PENGUJI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xvii
ABSTAK	xvii
ABSTRACT.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	26
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	26
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	28
A. Studi Kepustakaan.....	28
1. Konsep Administrasi	28
3. Konsep Manajemen	37
4. Konsep Kebijakan Publik	40
5. Konsep Pelaksanaan	44
6. Konsep Program Jaringan Gas Rumah Tangga	47
B. Kerangka Pikir	49
C. Konsep Operasional	51

D. Operasional Variabel.....	53
E. Teknik Pengukuran	55
BAB III METODE PENELITIAN	70
A. Tipe Penelitian	70
B. Lokasi Penelitian.....	71
C. Populasi dan sampel.....	71
D. Teknik Penarikan Sampel	72
E. Jenis dan Sumber Data.....	73
F. Teknik Pengumpulan Data.....	74
G. Teknik Analisa Data.....	75
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	76
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	77
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	77
B. Gambaran Umum Dinas ESDM Kota Pekanbaru.....	84
C. Gambaran Umum Kecamatan Sail.....	96
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	101
A. Identitas Responden Penelitian	101
B. Hasil Dan Pembahasan.....	103
C. Rekapitulasi Jawaban Responden	130
D. Faktor-Faktor Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Jargas	134
BAB VI PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	140
LAMPIRAN.....	143

DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1 Konsumsi Energi Nasional Tahun 2017	2
--	---



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Jumlah jaringan gas rumah tangga di kelurahan kecamatan Sail dan Kecamatan Pekanbaru Kota pada tahun 2018.....	22
I.2 : Jumlah jaringan distribusi gas rumah tangga yang bermasalah pada tahun 2018.....	24
II.1 : Operasional Variabel tentang Implementasi Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru.....	54
III.1 : Populasi dan Sampel Informan Dalam Penelitian.....	72
III. 2: Populasi dan Sampel Pegawai dan Masyarakat Dalam Penelitian.....	72
III.3 : Jadwal Kegiatan Penelitian.....	76
IV.1 : Luas Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.....	80
IV.2 : Beberapa Etnis di Kota Pekanbaru.....	81
IV.3 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Pekanbaru tahun 2019.....	83
IV.4 : Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah menurut Kelurahan di Kecamatan Sail Tahun 2018.....	97
IV.5 : Luas Wilayah Menurut Pengguna Lahan dan Kelurahan di Kecamatan Sail.....	98
IV.6 : Perbandingan Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Sail Tahun 2018.....	99
V.1 : Distribusi Jenis Kelamin Responden Penelitian.....	101
V.2 : Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur.....	102
V.3 : Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	102
V.4 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Standar dan Sasaran Kebijakan Untuk Pegawai.....	104
V.5 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Standard dan Sasaran Kebijakan Untuk Masyarakat.....	106

V.6 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Sumber Daya Untuk Pegawai.....	109
V.7 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Sumber Daya Untuk Masyarakat.....	110
V.8 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Komunikasi Antar Organisasi Untuk Pegawai.....	113
V.9 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Komunikasi Antar Organisasi Untuk Masyarakat.....	114
V.10 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Karakteristik Agen Pelaksana Untuk Pegawai.....	117
V.11 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Karakteristik Agen Pelaksana Untuk Masyarakat.....	119
V.12 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Untuk Pegawai.....	122
V.13 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Untuk Masyarakat.....	123
V.14 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Disposisi Implementor Untuk Pegawai.....	126
V.15 : Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Disposisi Implementor Untuk Masyarakat.....	128
V.16 : Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru Untuk Pegawai.....	130
V.17 : Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru Untuk Masyarakat.....	132

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
II.1	Kerangka pikir tentang Implementasi Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru.....	51



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuesioner (untuk responden masyarakat kecamatan Sail yang menggunakan jaringan gas rumah tangga) Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru.....	143
2. Daftar Kuesioner (untuk responden pegawai di Dinas ESDM dan di PT. SPEM) penelitian tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru.....	154
3. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru.....	161
4. Tabel Rekapitulasi Telly Tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru.....	164
5. Foto Dokumentasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru.....	167
6. Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau No 246/UIR-FS/KPTS/2020.....	175
7. Surat Rekomendasi Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik No 2057/E-UIR/27-FS/2020.....	176
8. Surat Rekomendasi Pemerintah Provinsi Riau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu.....	177
9. Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru Tentang Pelaksanaan Riset/Prariset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Olahan.....	178
10. Surat Keterangan Izin Penelitian dari Kantor Camat Sail.....	179
11. Surat Balasan Dari Kantor Camat Sail.....	180
12. Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi.....	181

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Safitri Dolok Saribu
NPM : 167110423
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Stara Satu (S1)
Judul Usulan Penelitian : Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya melanggar dan belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanoa tekanan dari pihak manapun juga:

Pekanbaru, 25 November 2020

Pelaku Pernyataan

Eka Safitri DS

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN JARINGAN GAS
RUMAH TANGGA DI KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Oleh

EKA SAFITRI DOLOK SARIBU

(167110423)

Kata Kunci: Pelaksanaan, Program Jaringan Gas Rumah Tangga

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sail kota Pekanbaru. Adapun permasalahan dalam penelitian ini bagaimanakah pelaksanaan dan apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengukuran skala likert. Jumlah sampel sebanyak 105 orang, diambil dari pegawai dinas dan masyarakat pengguna jaringan gas rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota Pekanbaru berjalan cukup terlaksana dalam arti masih banyak yang harus diperhatikan dan ditingkatkan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Seperti sosialisasi harus benar-benar dilakukan dengan baik dan secara menyeluruh dan dalam melaksanakan pembangunan semua harus diperiksa kembali agar tidak ada masalah yang ditemukan oleh masyarakat.

**IMPLEMENTATION OF THE HOUSEHOLD GAS NETWORK
DEVELOPMENT PROGRAM IN PEKANBARU CITY**

ABSTRACT

Oleh

Eka Safitri Dolok Saribu

(167110423)

Keywords: Implementation, Household Gas Network Program

The purpose of this study was to identify and explain the implementation of the Household Gas Network Development Program in Pekanbaru City. This research was conducted in Sail District, Pekanbaru City. The problem in this research is how is the implementation and what are the factors that influence the implementation of household gas network development in the city of Pekanbaru. The data collection techniques that the writer uses in this research are observation, questionnaires, interviews, and documentation. The type of research used in this research is descriptive using a quantitative approach. In this study using the Likert scale measurement technique. The number of samples is 105 people, taken from official employees and community users of household gas networks. The results showed that the implementation of the household gas network development program in the city of Pekanbaru was running quite well in the sense that there were still many things that had to be considered and improved in accordance with the established mechanisms. Such as the socialization must really be carried out well and thoroughly and in carrying out the construction everything must be checked again so that no problems are found by the community.

BAB I

PENDAHULUAN

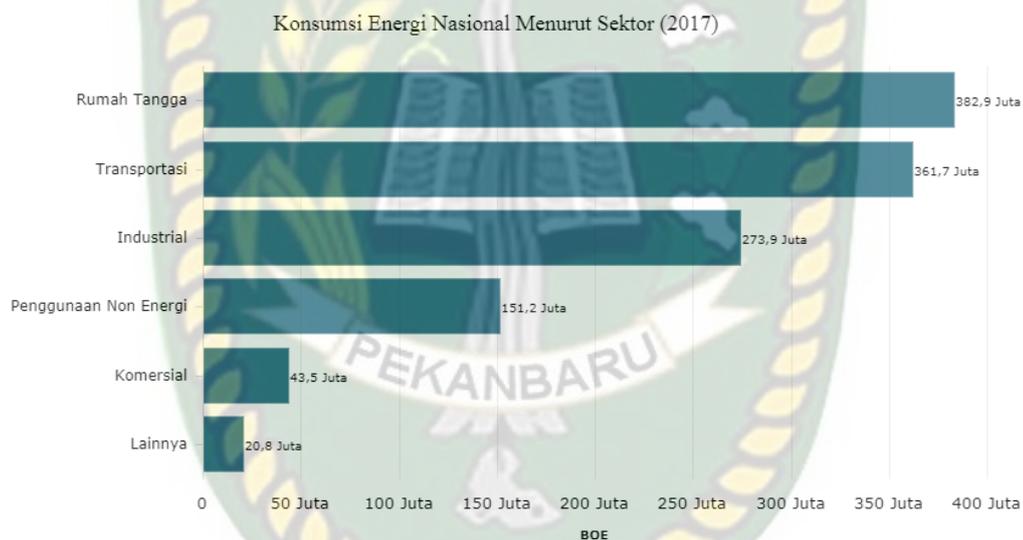
A. Latar Belakang

Energi merupakan suatu hal yang penting bagi pendukung pembangunan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional. Pengelolaan energi nasional tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat (2) dan Ayat (3) yang menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah berperan sebagai penyelenggara, pembuat kebijakan, pengatur, pelaksana serta pengawas dalam pengelolaan energi nasional dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Mengenai energi nasional diatur dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2007 Tentang energi yang menyatakan bahwa pengelolaan energi meliputi penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan harus berdasarkan asas kemanfaatan, rasionalitas, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, ketahanan nasional dan keterpaduan dengan mengutamakan kepentingan nasional dimana pengelolaan energi harus pula mempertimbangkan aspek lingkungan.

Kebutuhan energi Nasional terbagi ke dalam beberapa sektor yaitu transportasi, industri, komersial, rumah tangga, penggunaan non energi dan lainnya. Berdasarkan data kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), konsumsi energi nasional pada tahun 2017 mencapai 1,27 miliar *Barrels Oil Equivalent* (BOE). Berikut ini grafik konsumsi energi nasional menurut sektor pada tahun 2017 :

Grafik 1.1 Konsumsi Energi Nasional Tahun 2017



(sumber: situs web databoks, 2018)

Grafik 1 menunjukkan Konsumsi energi nasional mencapai 1,23 miliar barrels oil equivalent (BOE) pada 2017. Berdasarkan data Kementerian ESDM, dari jumlah tersebut sebanyak 382,95 juta BOE atau hampir sepertiga konsumsi energi untuk sektor rumah tangga dan merupakan yang terbesar dibanding sektor lainnya. Di urutan kedua konsumsi energi adalah untuk sektor transportasi, yakni

mencapai 361,7 juta BOE (29,31%) kemudian diikuti sektor industri sebesar 273,86 juta BOE (22,19%). Menurut jenisnya, bahan bakar minyak (BBM) masih mendominasi penggunaan konsumsi energi nasional, yaitu sebesar 356,33 juta BOE (28,88%). Lalu diikuti biomassa di posisi kedua dengan konsumsi sebanyak 306,25 juta BOE (24,82%) dan listrik di urutan ketiga 136,7 juta BOE (11%). Jumlah rumah tangga saat ini mencapai 67,17 juta dan pasokan energi nasional mencapai 1,34 miliar BOE. Artinya pasokan energi nasional mencapai 5,13 BOE/kapita. Sementara konsumsi energi sebesar 927,75 juta BOE, yang berarti konsumsi energi nasional mencapai 3,54 BOE/kapita.

Sejak beberapa tahun lalu, Pemerintah berusaha melakukan berbagai upaya untuk menekan pertumbuhan penggunaan BBM dengan mengalihkan ke energi alternatif. Tujuan akhirnya untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri. Hal ini perlu dilakukan agar dapat meningkatkan *fuel security of supply*, tercapainya keseimbangan baruan energi dan menurunkan subsidi minyak tanah. Di sisi lain cadangan minyak bumi di Indonesia makin menipis. Produksinya cenderung menurun dari tahun ke tahun. Selain itu harga minyak bumi cenderung naik sehingga pernah menyentuh level US\$100 per barel.

Hal ini menyebabkan beban subsidi untuk energi bisa membengkak. Pemerintah tidak tinggal diam, pemerintah terus berupaya agar subsidi energi, khusus bahan bakar minyak (BBM), yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tidak terlampaui. Sejumlah langkah strategis dilakukan, salah satunya dengan mencari sumber energi alternatif sekaligus sebagai pengganti BBM. Maka dengan kondisi menipisnya sumber daya minyak

dan masih banyak sumber daya gas, tidak ada lagi istilah tawar-menawar untuk semain fokus pada pemanfaatan gas bumi.

Salah satu langkah strategis Pemerintah untuk menggantikan penggunaan minyak bumi adalah meningkatkan penggunaan bahan bakar gas bumi untuk sector rumah tangga dan pelanggan kecil. Program ini disebut jaringan gas untuk rumah tangga atau gas kota. Jaringan gas untuk rumah tangga berarti mengalirkan gas melalui jaringan pipa hingga ke rumah tangga. Pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih dan murah serta program komplementer konversi minyak tanah ke LPG untuk mempercepat pengurangan penggunaan minyak bumi. Melalui program ini, masyarakat diharapkan mendapat bahan bakar yang lebih bersih, aman, dan murah.

Program ini berdasarkan Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2015-2019 sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah. Dan pada tahun 2019 Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan transmisi atau distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

Penetapan ini dengan pertimbangan bahwa sumber daya energi merupakan sumber daya alam yang strategis dan sangat penting bagi hajat hidup rakyat banyak dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional sehingga harus

dikuasai negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, dalam menjamin ketahanan energi nasional dan mempercepat terwujudnya diversifikasi energi serta mendorong terwujudnya penyediaan energi secara mandiri, diperlukan percepatan penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.

Menteri ESDM melakukan perencanaan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas yang didasarkan pada:

- a. Volume kebutuhan penyaluran gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.
- b. Ketersediaan sumber gas bumi
- c. Ketersediaan infrastruktur penunjang.

Gubernur, bupati/walikota, dan/atau badan usaha dapat mengusulkan volume kebutuhan penyaluran gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil kepada Menteri ESDM. Menteri menetapkan alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perencanaan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas. Kontraktor wajib mengalokasikan bagian produksi gas bumi dari wilayah kerjanya untuk keperluan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas untuk memenuhi alokasi dan pemanfaatan gas bumi yang ditetapkan.

Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian gas melalui jargas meliputi pembangunan dan/atau pengoperasian jargas, penyaluran gas bumi melalui jargas dan pemeliharaan jargas. Pembangunan jargas dilaksanakan dengan pembiayaan Pemerintah Pusat. Penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas

dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau badan usaha. Penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh Menteri ESDM dan BUMN Migas.

Melalui program jaringan gas rumah tangga ini, berbagai manfaat dan keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat dalam lingkungan sekitarnya yaitu antara lain:

1. Pengeluaran biaya untuk memasak lebih hemat dibandingkan pada saat menggunakan LPG.

Peningkatan kesejahteraan rakyat (kesra) adalah uang yang dapat dihemat jika beralih ke energi gas bumi, dihitung berdasarkan statistik rata-rata pengeluaran energi dikurangi dengan besarnya biaya jika menggunakan gas bumi atau selisih antara biaya rata-rata semula dikurangi dengan biaya rata-rata pemakaian energi. Nilai rata-rata statistik yang digunakan adalah Rp11.500/bulan, yaitu selisih besarnya biaya energi per bulan dengan tarif energi gas bumi per bulan sebesar Rp50.000 (data hasil survei pembangunan jaringan gas di masyarakat di kecamatan Sail). (sumber buku jaringan gas bumi)

2. Pasokan gas terjamin ketersediaannya sehingga tidak sulit lagi mencari gas disaat gas mulai langka.

Pada masa saat ini, masyarakat sangat sulit mendapatkan gas LPG berat 3kg, masyarakat merasa bahwa gas LPG 3kg sudah semakin langka dan

sekali pun ada harganya sangat mahal, karena itu dengan adanya jaringan gas rumah tangga ini masyarakat tidak lagi kesulitan dalam mencari gas.

3. Jaringan gas rumah tangga tingkat kemanannya lebih baik.

Berdasarkan standarisasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan gas bumi, Kementerian ESDM bahwa standar desain untuk saringan pipa memiliki daya tahan perpipaan minimal 20 tahun. Diameter pipa yang dipergunakan adalah 6", 4", 10 mm, 125 mm, dan 90 mm.

4. Penggunaan gas bumi yang dialirkan melalui pipa juga lebih ramah lingkungan.

Pemanfaatan gas bumi untuk rumah tangga juga ramah lingkungan. Terlebih, jaringan gas untuk rumah tangga bisa menjadi pendukung terhadap program-program lingkungan yang dijalankan oleh Pemerintah. Selain itu, gas bumi sebagai bahan bakar lebih bersih karena tidak mengeluarkan banyak asap dan tidak meninggalkan jelaga.

Seluruh masyarakat dapat menggunakan jaringan gas rumah tangga, dan kembali kepada persetujuan masing-masing rumah tangga, apakah mau menggunakan jaringan gas rumah tangga atau tidak. karena pembangunan jaringan gas rumah tangga ini akan dilaksanakan di seluruh daerah dengan cara melakukan pembangunan secara bertahap. PT Pertamina (Persero) selaku pemilik alokasi gas bumi telah menugaskan afiliasinya PT Pertagas Niaga (selanjutnya disebut Pertamina) untuk menyalurkan gas bumi kepada pelanggan rumah tangga dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyambungan

- a. Penyambungan instalasi jargas ke kompor pelanggan akan dilakukan oleh Pertamina setelah pelanggan:
 - Membayar biaya penyambungan dan deposit sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pertamina, serta biaya materai
 - Menyediakan tempat untuk pemasangan meter gas bumi dan instalasi lainnya yang diperlukan
- b. Petugas Pertamina atau wakil yang ditunjuk akan melakukan modifikasi (permanen) terhadap kompor pelanggan agar dapat digubakan dengan baik dan aman.
- c. Apabila pelanggan bermaksud untuk tidak menggunakan kembali instalasi jargas, maka segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan remodifikasi kompor ataupun penggantian kompor baru menjadi beban pelanggan.
- d. Proses penyambungan instalasi jargas kepada pelanggan akan dibatalkan, apabila lokasi bangunan pelanggan dimaksud terdapat putusan pengadilan atau disegel oleh instansi terkait atau ketentuan pemerintah sedemikian sehingga bangunan tersebut harus dibongkar. Biaya pembangunan yang telah dibayar oleh pelanggan tidak dapat dikembalikan oleh Pertamina kepada pelanggan.

2. Harga gas, biaya penyambungan dan deposit

- a. Harga gas bumi yang dijual oleh Pertamina kepada pelanggan ditetapkan oleh pemerintah dan dibayarkan langsung dari pelanggan

kepada pertamina menggunakan metode atau melalui loket atau bank yang ditetapkan dan ditunjuk oleh pertamina.

- b. Apabila meter rumah tangga tidak berfungsi dengan baik/rusak/hilang, pertamina akan melakukan perhitungan pemakaian gas bumi dengan menggunakan metode penaksiran terhadap pemakaian gas bumi rata-rata 3 bulan sebelumnya.
 - c. Biaya penyambungan akan dibebankan kepada pelanggan dan dibayarkan secara tunai kepada pihak/bank/loket yang telah ditetapkan oleh pertamina
 - d. Pertamina menetapkan deposit sebesar Rp 200.000 sebagai jaminan yang akan dikembalikan kepada pelanggan apabila dilakukan penghentian penyaluran oleh pertamina berdasarkan permintaan pelanggan. Besaran nilai deposit akan dikembalikan seluruhnya jika seluruh kewajiban pelanggan telah terpenuhi.
3. Kewajiban pelanggan
- a. Melengkapi data-data dan dokumen yang dipersyaratkan oleh pertamina, berupa fotocopi diantaranya:
 - Kartu identitas penduduk (KTP/SIM)
 - Kartu keluarga (KK)
 - Rekening listrik 3 bulan terakhir

- b. Bersedia dan menyetujui terkait pelaksanaan modifikasi (permanen) terhadap komponen kompor milik pelanggan untuk dapat menggunakan gas bumi
- c. Melakukan pembayaran tagihan gas bumi paling lambat tanggal 30 setiap bulannya di tempat yang telah ditentukan oleh Pertamina, termasuk denda keterlambatan (jika ada)
- d. Membayar biaya yang dikeluarkan oleh Pertamina termasuk pemakaian gas bumi di luar sepengetahuan Pertamina yang diakibatkan ditemukannya pelanggaran pemakaian gas bumi
- e. Bertanggung jawab terhadap segala kerugian dan kerusakan yang ditimbulkan akibat kelalian pemakaian yang tidak sesuai dengan standar atau aturan yang ditentukan oleh Pertamina
- f. Melaporkan kepada Pertamina apabila terjadi kondisi perubahan, penambahan, kerusakan, kebocoran, atau kehilangan pada instansi jargas. Apabila pelanggan terbukti melakukan pembiaran terhadap kondisi tersebut maka pelanggan wajib menanggung seluruh biaya yang timbul.

4. Sanksi dan biaya keterlambatan

- a. Apabila pelanggan terlambat melakukan pembayaran tagihan maka:
 - Pertamina berhak mengenakan sanksi/denda atas keterlambatan pembayaran tagihan gas bumi tiap bulannya sebesar Rp 15.000, yang akan ditagih pada tagihan bulan berikutnya

- Pertamina berhak menghentikan sementara penyaluran gas bumi ke pelanggan (melakukan penyegelan meter) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu apabila pelanggan tidak melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran tagihan gas bumi dalam waktu 1 bulan dan untuk dapat dilakukan pengaliran kembali, maka pelanggan wajib membayar tunggakan tagihan dan denda keterlambatan pembayaran beserta biaya pengaliran kembali sebesar Rp 20.000
 - Pertamina berhak menghentikan penyaluran gas bumi ke pelanggan dan membongkar instansi jargas yang digunakan untuk menyalurkan gas bumi ke pelanggan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dari Pertamina apabila pelanggan tidak melaksanakan seluruh kewajiban pembayaran tagihan gas bumi dalam waktu 2 bulan, dan biaya deposit akan menjadi milik Pertamina
- a. Apabila setelah melakukan pembongkaran instalasi jargas, pelanggan berminat untuk melakukan pemasangan kembali, maka pelanggan wajib:
- Membayar biaya operasional atau biaya pemasangan instalasi jargas bumi dengan tarif sebesar Rp 4.500.000,-
 - Melunasi seluruh kewajiban pembayaran tagihan gas bumi termasuk denda keterlambatan.

5. Ketentuan lain

Syarat dan ketentuan berlangganan jargas ini tunduk kepada seluruh peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS).

Standar Operasional Prosedur wajib dilaksanakan dan dipakai untuk seluruh aktivitas pelaksanaan proyek pembangunan jaringan distribusi gas rumah tangga, dari sejak pekerjaan persiapan dimulai hingga pelaksanaan pekerjaan utama dan finishing serta pekerjaan non teknis lainnya. Adapun jenis pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas yang dimaksudkan dalam pelaksanaan proyek pembangunan jaringan distribusi gas rumah tangga tersebut adalah meliputi antara lain:

1. Pekerjaan fisik jaringan distribusi gas rumah tangga

Pekerjaan fisik yang harus dilaksanakan oleh penyedia barang dan jasa dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan borongan tersebut adalah:

- Pekerjaan persiapan
- Pekerjaan pengadaan dan penanganan material
- Pekerjaan bongkaran dangalian
- Pekerjaan pembangunan pipa
- Pekerjaan penurunan pipa, perlindungan khusus valve dan pengeboran
- Pekerjaan pengurangan dan pembersihan
- Pekerjaan pengujian
- Pekerjaan bangunan

- Pekerjaan pengecatan
- Pekerjaan khusus

2. Perizinan

Sebelum memulai pekerjaan atau memasuki daerah tertentu, penyedia barang/jasa wajib meminta atau persetujuan guna pemasangan pipa gas bertekanan dari instansi-instansi pemerintah yang terkait.

3. Gambar kerja

Gambar-gambar yang terlampir dalam dokumen kontrak dan diberikan ke penyedia barang/jasa selama pelaksanaan pekerjaan adalah merupakan bagian dari dokumen kontrak sehingga merupakan hal yang mengikat bagi penyedia barang/jasa.

4. Standar, spesifikasi, dan peraturan

Semua pekerjaan, material, dan peralatan yang akan dilaksanakan disediakan penyedia barang/jasa harus sesuai dengan standar dan spesifikasi.

5. HSE (Health, Safety dan Environment)

Penyediaan barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan jaringan distribusi gas rumah tangga ini, harus melaksanakan fungsi kesehatan, keselamatan kerja, dan harmonisasi aspek lingkungan selama periode pelaksanaan proyek tersebut kepada seluruh stakeholder.

6. Mutu

Semua jenis material dan peralatan yang atau harus disupply oleh penyedia barang/jasa harus sesuai dengan mutu/kualitas yang telah ditentukan dan mendapatkan persetujuan direksi pengawas.

7. Rencana kerja pelaksanaan

Penyedia barang/jasa harus membuat rencana pelaksanaan pekerjaan dan jadwal secara menyeluruh dan terperinci, baik pekerjaan utama, sementara maupun pengadaan tenaga, material dan peralatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemberi tugas

8. Pelaporan

Penyedia barang/jasa harus mempersiapkan dan menyediakan secara rutin laporan harian, mingguan dan bulanan sesuai form dari pemberian tugas yang ada.

9. Waktu kerja

Dalam melaksanakan pekerjaannya, penyedia barang/jasa wajib memperhatikan hari libur, yang berlaku secara nasional maupun setempat.

Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral mendapatkan penugasan penyediaan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga dari pemerintah melalui Perpres Nomor 19 Tahun 2010 tentang rencana kerja pemerintah melalui Tahun 2011 dan Instruksi Presiden (Inpres) No 01 Tahun 2010 tentang Pecepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010 serta melalui rapat dengar pendapat dengan komisi VII DPR. Program pembangunan jaringan gas rumah tangga ini dibangun di kota-kota atau daerah yang dekat dengan sumber

gas bumi dan memiliki jaringan transmisi gas bumi. Jaringan gas untuk rumah tangga menggunakan dana dari APBN. Biaya pemasangan saluran pipa sampai ke rumah-rumah gratis namun untuk pemakaiannya tetap dikenakan biaya setiap bulannya.

Dengan adanya kebijakan tersebut pemerintah daerah sebagai penerus dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat berperan serta dan mewujudkan daerahnya menjadi kota gas di masa mendatang. Pembangunan jaringan gas rumah tangga dibangun secara bertahap karena keterbatasan anggaran. Program ini dilaksanakan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Pertamina Gas dan PT. Perusahaan Gas Negara yang selanjutnya bertindak sebagai operator. Penugasan pada PT. Pertamina tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3328K/12/MEM/2015 Tentang Penugasan Kepada PT. Pertamina (Persero) dalam penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan gas bumi untuk rumah tangga tahun anggaran 2015.

Dalam Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun oleh Pemerintah dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3337K/12/MEM/2015 Penugasan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga tahun anggaran 2015. Kedua BUMN bertanggung jawab atas desain pembangunan jaringan gas, mengutamakan penggunaan material dan komponen yang diproduksi dalam negeri, menjamin

penyelesaian sesuai kaidah keteknikan dan keselamatan, melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan.

Pengerjaan jaringan gas untuk rumah tangga terdiri atas tahap prakonstruksi, konstruksi, dan operasional. Pada tahap prakonstruksi, kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemilihan lokasi dan perizinan, termasuk izin menggunakan lahan. Selain perizinan, juga dilakukan upaya koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki jaringan perpipaan dan kabel di sekitar lokasi jalur pipa tersebut, seperti Telkom, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PLN dan lain-lain. Dalam perizinan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat belum dilibatkan mengingat peletakan pipa berada di dalam tanah. Lahan di atasnya masih dapat digunakan oleh pemiliknya.

Tahap konstruksi merupakan tahap kegiatan fisik pelaksanaan berupa pemasangan pipa. Kegiatan ini meliputi mobilisasi peralatan dan material, penggalian, serta pengelasan *testing and comissioning*. Kegiatan pertama yang dilakukan dalam tahap konstruksi adalah penerimaan kerja yang direkrut oleh kontraktor pelaksana. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam tahap konstruksi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kualifikasi yang dimiliki. Penggunaan tenaga kerja diprioritaskan berasal dari penduduk di sekitar lokasi kegiatan. Pekerjaan pemasangan pipa dilakukan tergantung pada kondisi saat pemasangan pipa, khususnya cuaca.

Langkah selanjutnya adalah penyiapan lahan sebagai kegiatan fisik pertama pada tahap konstruksi antara lain terdiri atas:

- a. Pengukuran dan pematokan
- b. Pembersihan jalur pipa
- c. Pembuatan tanda pengaman
- d. Pembuatan direksi keet
- e. Pengangkutan pipa dan fittings
- f. Pembuatan papan nama proyek

Pelaksanaan pemasangan kosntruksi harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah:

- a. Jaringan pipa yang akan dipasang harus memenuhi standar dan spesifikasi teknis, seperti yang tertuang pada SNI WAJIB 13-3473-2002 tentang Sistem Perpipaan Transmisi dan Distribusi Gas. Hal ini mencakup pipa dan material yang akan digunakan, diameter pipa, rute atau lokasi yang ditentukan, tekanan yang diperlukan, sistem penyambungan pipa, dan pengamanan pipa yang terpasang
- b. Perlintasan dengan jaringan. Bila pipa gas berlintasan dengan utilitas lain, maka pipa harus dipasang di bawah utilitas tersebut dengan jarak minimal sesuai dengan ketentuan dalam SNI. Selain itu, jarak minimal 1 m diberlakukan bila berlintasan dengan pipa gas lain. Bila pipa gas sejajar dengan jaringan lain, maka pipa harus diberi jarak minimal 2 m.

- c. Di atas tanah. Bila di atas jalur penggalian terdapat tiang-tiang listrik, telepon, atau sarana lainnya, maka kontraktor agar mengamankannya dengan mengadakan dan memasang penyangga atau memindahkan untuk sementara atas seizin instansi yang berwenang. Kontraktor segera memperbaiki seperti keadaan semula bila pemasangan pipa telah dilaksanakan.
- d. Saluran air. Umumnya, untuk perlintasan dengan saluran-saluran air pembuangan perkotaan, pemasangan pipa ditanam dengan kedalaman sekurang-kurangnya 1.000 mm di bawah dasar saluran irigasi. Tanpa seizin Direksi Pengawas, kontraktor tidak diperkenankan melakukan perusakan pada saluran-saluran air yang ada di sekitar tempat pemasangan pipa gas.

Setelah konstruksi, tahap berikutnya ialah operasional. Tahap operasional adalah tahap kegiatan pengeoperasian jaringan pipa distribusi yang telah dibangun. Tahap ini terdiri atas:

- a. Pengoperasian jaringan pipa distirbusi
Pada kondisi normal, jaringan pipa distribusi dioperasikan pada tekanan yang sesuai dengan tekanan yang dibutuhkan. Alat pengatur tekanan pada distirbusi tekanan rendah adalah Matering and Regulating Station (MR/S), sedangkan untuk menurunkan tekanan pada meter konsumen rumah tangga menggunakan sevice regulator.
- b. Pengoperasian sistem jaringan pipa distribusi tekanan tinggi, menengah, dan rendah

Sistem pengoperasian jaringan distribusi gas dibagi menjadi tiga system, yaitu sistem jaringan tekanan tinggi, tekanan menengah, dan sistem jaringan pipa distribusi. Setiap sistem jaringan pipa distribusi dipasok dari suatu sumber gas dengan tekanan lebih tinggi.

c. Prosedur pengoperasian pengatur tekanan berlebih

- Active regulator. Ketentuan yang berlaku dalam pengoperasian active regulator meliputi: Menjaga dan mengawasi agar tekanan regulator aktif berada pada angka yang sesuai dengan tekanan yang ditentukan.
- Regulator monitor. Regulator monitor dipasang pada tekanan yang lebih tinggi dari tekanan regulator operasi dan pada posisi terbuka penuh selama operasi berjalan dengan normal.
- Relief valve. Relief valve akan bekerja jika tekanan operasi gas lebih besar dari setting relief valve. Setting relief valve lebih besar daripada setting monitor regulator aktif.

d. Perawatan pipa gas dan stasiun penerima

Untuk menjaga agar jaringan pipa gas dapat bertahan seperti yang direncanakan (minimum 20 tahun), maka diperlukan perawatan terhadap pipa gas. Perawatan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap korosi (pada tahap konstruksi) gempa/bencana alam dan juga perilaku manusia.

Pada tahap prakonstruksi, kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemilihan lokasi dan perizinan, termasuk izin menggunakan lahan. Selain perizinan, juga

dilakukan upaya koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki jaringan perpipaan dan kabel di sekitar lokasi jalur pipa tersebut, seperti Telkom, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), PLN dan lain-lain. Sedangkan pada tahap konstruksi, pelaksanaan pemasangan pipa gas dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Gas Negara Persero. Perluasan jaringan gas bumi disektor rumah tangga yang sebelumnya sudah dibangun di beberapa provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, serta Sumatera Selatan dan provinsi Riau.

Keputusan Menteri ESDM Nomor 2024 K/10/MEM/2015 Tentang Penugasan Kepada PT Pertamina (Persero) Dalam Pembangunan dan Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi Untuk rumah Tangga Tahun Anggaran 2015 di kota Lhoksukon dan kota Pekanbaru. Dalam pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota Pekanbaru PT Pertamina (Persero) melalui afiliasinya PT Pertagas Niaga bekerja sama dengan PT. Sarana Pembangunan Energi Madani (Anak Perusahaan BUMD Pekanbaru).

Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau, yang terdiri dari 12 kecamatan. Kota Pekanbaru akan merasakan adanya program baru dari Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang melimpah. Melalui program ini dapat membantu kota Pekanbaru untuk menuju kota pintar atau smart city melalui perwujudan *smart city* dan *smart economy*.

Dinas sumber daya mineral Pekanbaru memiliki peran sebagai pengawas dalam pembangunan program jaringan gas, dan pelaksana pembangunan di

lapangan dilakukan oleh kontraktor. Pembangunan jaringan pipa gas rumah tangga tahap pertama dilakukan di Kecamatan Lima Puluh pada Juni 2015. Kecamatan lima puluh merupakan daerah pertama di kota pekanbaru yang dapat menikmati jaringan pipa gas rumah tangga. Dipilihnya kecamatan lima puluh menjadi tempat pertama dibangunnya jaringan pipa gas rumah tangga karena di lihat dari kontur tanah lokasi yang dekat dengan sumber aliran gas adalah daerah tersebut. (*riaugreen.com*). Jumlah pemasangan jaringan gas rumah tangga di Kecamatan Limapuluh sebanyak 3.713 sambungan, yang terdapat dalam 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Tanjung RHU, Sekip, Rintis, Pesisir.

Setelah dinilai berhasil pada tahap pembangunan pertama di Kecamatan Limapuluh, selanjutnya dilakukan pembangunan tahap kedua pada tahun 2018 di Kecamatan Sail dan Kecamatan Pekanbaru Kota, yang terdapat dalam 11 kelurahan. Menurut hasil wawancara dengan bapak Jhon Susilo sebagai koordinator jaringan gas di PT. Pembangunan Energi Madani, beliau mengatakan bahwa “program pembangunan jaringan gas rumah tangga ini akan dilakukan secara berkelanjutan”. Titik instalasi pada jaringan gas ini pada satu daerah memiliki 2 titik instalasi, pada kecamatan sail terdapat 2 titik instalasi yaitu yang berada pada pasar sail dan kantor camat sail.

Pada tahap kedua di tahun 2018 di Kecamatan Sail dan sebagian Pekanbaru Kota dilakukan pembangunan dengan jumlah sebanyak lebih dari 3.000 sambungan rumah. Berikut ini tabel jumlah jaringan distribusi gas rumah tangga pada kecamatan Sail, dan Pekanbaru kota:

Tabel 1.1 Jumlah jaringan gas rumah tangga di kelurahan kecamatan Sail, dan kecamatan Pekanbaru Kota Tahun 2018

No	Kelurahan	Jumlah Sambungan Rumah
1	Suka Mulya	849
2	Suka Maju	635
3	Cinta Raja	286
4	Suka Ramai	275
5	Kota Baru	225
6	Tanah Datar	301
7	Kota Tinggi	122
8	Suma Hilang	407
9	TG.RHU	111
10	Sekip	30
11	Pesisir	29
	Jumlah	3.270

(sumber: PT Sarana Pembangunan Energi Madani)

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa bertambahnya jaringan distribusi gas rumah tangga pada tahun 2018 di kota Pekanbaru pada kecamatan Sail dan Kecamatan Pekanbaru Kota dengan jumlah 3.270 saluran rumah, yang berada pada 3 kelurahan di kecamatan sail yaitu kelurahan suka mulya, sukamaju, dan cinta raja. Dan terdapat 5 kelurahan di kecamatan Pekanbaru kota yaitu, kelurahan suka ramai, kota baru, tanah datar, kota tinggi, dan suma hilang. Dan tiga kelurahan di kecamatan limapuluh yaitu, kelurahan TG.RHU, Sekip,dan Pesisir. Paling banyak jumlah jaringan distribusi gas rumah tangga dari tiga kecamatan tersebut adalah kelurahan suka mulya dengan jumlah jaringan distribusi gas sebanyak 849 sambungan rumah. Sedangkan yang paling sedikit adalah kelurahan

Pesisir yaitu dengan jumlah 29 sambungan rumah. Pada penelitian ini, peneliti akan fokus di kecamatan sail.

Jaringan gas rumah tangga tidak terlepas dari sosialisasi dan pengawasan agar penerapannya lebih optimal. Adapun sosialisasi yang telah dilakukan menurut hasil wawancara dengan bapak Jhon Sosilo sebagai koordinator jargas di PT.Sarana Pembangunan Energi Madani, beliau mengatakan bahwa “sosialisasi dilakukan di daerah yang akan dilakukan pembangunan, dan sosialisasi dilakukan di kantor lurah, dan yang melakukan sosialisasi tersebut adalah PT.Sarana Pembangunan Energi Madani, dan dihadiri oleh RT dan perwakilan warga setempat.

Hal yang menjadi masalah ialah pengetahuan masyarakat yang kurang memahami bagaimana cara penyaluran gas bumi ke rumah mereka dikarenakan sosialisasi yang tidak menyeluruh karena terbatasnya fasilitas dan kurangnya himbuan kepada masyarakat tentang adanya sosialisasi tersebut. Karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, sebagian masyarakat ragu untuk beralih menggunakan jaringan gas rumah tangga karena faktor keamanan yang masih kurang jelas diketahui oleh masyarakat. Sebagaimana masyarakat beranggapan bahwa keberadaan pipa gas yang tertanam dibawah tanah menjadikan rumah mereka tidak aman karena khawatir adanya ledakan serta ketidak tahuan bagaimana cara mendeteksi jika ada kebocoran gas.

Seharusnya menurut Kepmen No. 8086K/12/MEM/2016 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (PERSERO) TBK menjelaskan

bahwa dalam penugasan wajib menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga beserta infrastruktur pendukungnya kepada masyarakat pengguna.

Di sisi lain tidak sedikit masyarakat yang merasa bahwa pembangunan jaringan gas rumah tangga tersebut hanya menimbulkan kerusakan dan gangguan lainnya. Menurut hasil wawancara dengan salah satu warga di kecamatan Sail, beliau mengatakan bahwa “pembangunan jaringan gas rumah tangga tersebut menimbulkan kerusakan pada jalan, tanah bekas galian tidak ditimbun lagi dengan baik, sehingga sangat mengganggu aktivitas berjalan masyarakat”.

Dan setelah dilakukannya pembangunan, ada beberapa masalah yang ditemukan pada rumah tangga, seperti pipa buntu, meteran rusak, instalasi tidak sesuai, instalasi kurang panjang dan instalasi tidak sampai. Berikut ini tabel jumlah jaringan distribusi gas rumah tangga yang bermasalah pada tahun 2018(tahap 2):

Tabel I.2. tabel Jumlah jaringan distribusi gas rumah tangga yang bermasalah pada tahun 2018

No	Teknis	Jumlah Sambungan rumah
1.	Pipa buntu	37
2.	Meteran rusak/eror	242
3.	Meteran temper dicabut	149
4.	Instalasi tidak sampai	3
5.	Tekanan gas kecil	4
Total		435

(sumber: PT Sarana Pembangunan Energi Madani)

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa permasalahan yang paling banyak ditemukan adalah, meteran rusak/eror dengan jumlah sebanyak 242 saluran rumah. Dan jumlah masalah yang paling sedikit yaitu instalasi tidak sampai dengan jumlah sebanyak 3 saluran rumah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis menemukan fenomena yang terjadi pada pembangunan jaringan gas rumah tangga di Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya sosialisasi program jaringan gas rumah tangga kepada masyarakat, terkait dengan keamanan dan tata cara. Sehingga sebagian masyarakat menolak untuk beralih menggunakan jaringan gas rumah tangga.
2. Dengan dilakukannya pembangunan jaringan gas rumah tangga, tidak sedikit masyarakat juga merasa terganggu pada pembangunannya, karena tanah bekas galian tidak ditimbun dengan baik, sehingga masyarakat yang berkendara merasa kesulitan saat melintasi jalan (Antariau.com)
3. Setelah pembangunan dilaksanakan, ada beberapa masalah yang ditemukan, seperti pipa buntu dan meteran rusak.

Berdasarkan uraian fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat permasalahan tentang: **“Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bagian latar belakang bahwa berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu:

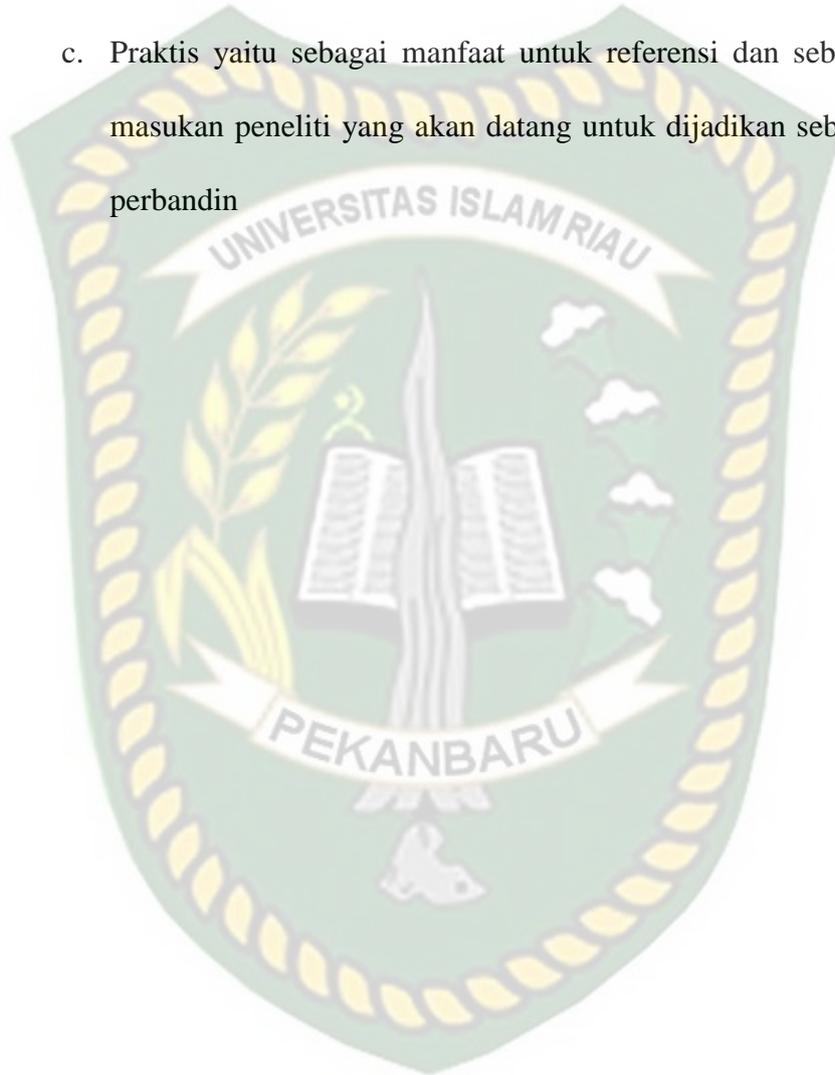
- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui factor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

- a. Akademik yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu administrasi

- b. Teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan ditemukannya hal-hal yang baru yang selama ini belum dapat perhatian
- c. Praktis yaitu sebagai manfaat untuk referensi dan sebagai bahan masukan peneliti yang akan datang untuk dijadikan sebagai bahan perbandin



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penulisan karya ilmiah atau suatu penelitian diperlukan adanya konsep landasan atau pedoman sebagai dasar untuk menegmukakan dan memahami permasalahan penelitian agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam sebuah penelitian.

Dapat dilihat konsep teori yang berhubungan dengan penelitian ini dan diuraikan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini. Karena penelitian ini membahas tentang sistem pemerintahan atau menyangkut tentang organisasi publik. Dan tentunya di dalam sistem pemerintahan tidak terlepas dari yang namanya manajemen. Manajemen berkembang dan hidup layaknya sebuah sistem. Manajemen hadir dengan peran yang melekat sebagai penyatu semua unsur tersebut. Dikarenakan sebuah sistem yang baik tidak akan terwujud tanpa bersatunya semua unsur-unsur tersebut. Dan berikut adalah penjelasan beberapa unsur dalam manajemen, antara lain:

1. Konsep Administrasi

Pengertian administrasi secara etimologi berasal dari bahasa latin yang terdiri dari kata “ad” artinya intensif dan “ministrate” artinya melayani, membantu, mengarahkan. Jadi dapat disimpulkan administrasi secara etimologi merupakan melayani secara intensif. Administrasi dalam arti sempit yaitu kegiatan tulis menulis, surat menyurat.

Pengertian administrasi secara luas menurut Sondang P Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi (edisi revisi) mengatakan Administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Woodrow Wilson administrasi merupakan suatu bidang usaha (*a field of business*) dan harus dipisahkan dari politik (dalam Miftah Thoha, 2008;8)

Menurut Brooks Adams administrasi merupakan kemampuan mengkoordinasikan berbagai ketentuan sosial yang sering kali bertentangan satu dengan yang lain di dalam suatu organism sedemikian padunya sehingga ketentuan-ketentuan tersebut dapat bergerak sebagai satu kesatuan (dalam Syafri, 2012;8).

Menurut Silalahi (dalam Zulkifli,2009,11) administrasi adalah kerja sama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan memberdayakan sumber daya-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Zulkifli (2009) administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial, mendefinisikan tidak terbatas hanya sekedar pekerjaan yang berkenaan dengan keseluruhan dari satu organisasi. Administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerja sama sejumlah manusia di dalam organanisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam mencapai tujuan administrasi maka diperlukan seperangkat instrument yang saling berkaitan satu sama lainnya yang disebut dengan unsur-unsur administrasi. Adapun unsur-unsur administrasi menurut Siagian adalah sebagai berikut:

1. Dua orang manusia atau lebih, diperlukan lebih dari satu orang karena seseorang tidak dapat bekerjasama dengan dirinya sendiri. Karenan itu harus ada orang lain yang secara sukarela atau dengan cara lain diajak turut serta dalam proses kerja sama itu.
2. Tujuan, tujuan yang hendak dicapai dapat ditentukan oleh semua orang yang langsung terlibat dalam proses administrasi tersebut. Tujuan dapat pula ditentukan oleh hanya sebagian dan mungkin pula hanya oleh seorang dari mereka yang terlibat.
3. Tugas yang hendak dilaksanakan, pencapaian tujuan akan lebih efisien dan ekonomis apabila semua orang yang terlibat mau bekerja sama satu sama lain. Kerja sama dalam administrasi dapat digolongkan ke dua golongan, yaitu kerja sama yang ikhlas dan sukarela dan kerjasama yang dipaksakan.
4. Sarana dan prasarana tertentu, sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses administrasi tergantung dari berbagai faktor, seperti:
 - a. Jumlah orang yang terlibat dalam proses tersebut
 - b. Sifat tujuan yang hendak dicapai
 - c. Ruang lingkup serta aneka ragamnya tugas yang hendak dijalankan
 - d. Sifat kerja sama yang dapat diciptakan dan dikembangkan.

Dalam administrasi terdapat administrasi publik. Secara sederhana administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari mengenai proses kegiatan suatu organisasi publik, seperti pemerintahan mulai dari tingkat terendah hingga tingkat tertinggi.

Menurut Henry dalam Harbani Pasolong (2008:8), Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan public agar lebih responsive terhadap kebutuhan sosial.

Sedangkan menurut Sugandhga administrasi publik adalah sebuah proses kegiatan penetapan sasaran-sasaran serta pelaksanaan tercapainya, dengan memanfaatkan semua sumber yang tersedia guna mewujudkan tujuan Negara yang dilakukan secara bekerjasama dengan melalui orang-orang, baik individu maupun kelompok serta terkoordinasi. (dalam Amim Ibrahim, 2004:10)

Chander dan Plano 9 dalam Pasolong 2007:7) mengatakan bahwa administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel public diorganisir dan dikoordinasikan untuk:

- a. Memformulasikan
- b. Mengimplementasikan
- c. Mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Ciri-ciri administrasi Publik menurut Thoha adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan yang diberikan administrasi Negara bersifat urgen dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta.
2. Pelayanan yang diberikan oleh administrasi Negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi monopoli. Dalam hal ini bentuk pelayanan yang diberikan tidak bisa dibagi kepada organisasi-organisasi lainnya.
3. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, administrasi Negara dan administratornya relative berdasarkan undang-undang dan peraturan.
4. Administrasi Negara dalam memberikan pelayanan tidak dikendalikan oleh harga pasar, tidak seperti yang terjadi dalam organisasi perusahaan yang terkait oleh harga pasar dan untung rugi.
5. Usaha-usaha dilakukan oleh administrasi Negara terutama dalam Negara demokrasi ialah sangat tergantung pada penilaian mata banyak. (dalam Nuri Yana 2012:15)

Administrasi dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas dan komitmen tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Administrasi bukan hanya sebatas proses ketik-mengetik surat, mencatat-mencatat atau arti sempit lainnya. Dan administrasi tidak hanya hadir sebagai sebuah proses sederhana yang mudah untuk disepelekan secara legalitas. Karena, sangat spesifik pembahasan administrasi secara meluas dan mencakup semua unsur yang ada di dalamnya, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya organisasi

lainnya, dimana sumber daya organisasi itu bias dikenal dengan istilah 6M, seperti yang tertera dalam buku yang ditulis oleh Zulkifli dan Nurmasari (2015), antara lain:

- a. *Man* (Manusia). Dalam organisasi manusia dikenal sebagai sumber daya manusia (SDM). SDM adalah sumber utama yang sangat menentukan keberlangsungan hidup sebuah organisasi. Apabila SDM di dalam suatu organisasi tersebut berkualitas, maka kehidupan organisasi tersebut pun akan berkualitas.
- b. *Money* (Uang). Yaitu sumber kekuatan utama kedua setelah manusia. Karena segala pergerakan yang dilakukan di dalam organisasi sangat tidak terlepas dari kebutuhan financial.
- c. *Method* (Metode). Yaitu cara segala macamjalan, taktik, strategi dalam menciptakan sebuah oprganisasi tersebut menjadi sangat produktif dan berkelanjutan.
- d. *Machine* (Mesin). Yaitu perangkat-perangkat kertas dalam organisasi yang membantu kelancaran pergerakan sebuah organisasi, dan tentunya membuat kinerja lebih praktis, ekonomis, efektif dan efesien.
- e. *Material* (bahan/alat). Yaitu sebagai sesuatu yang akan diolah, dibuat, dikerjakan, diproses dan dihasilkan. Bahan inilah yang akan dikerjakan menggunakan mesin. Bahan yang dimaksud disini adalah bahan baku atau bahan pokok dalam organisasi dan semua perangkat lunak selain mesin yang berupa perangkat keras.
- f. *Market* (pasar). Yaitu akan terealisasi dengan sendirinya dalam bentuk opini masyarakat atau unsur kepentingan. Sementara dalam organisasi privat atau

bisnis, market benar-benar diartikan sebagai pasar untuk tempat akhir adalah pemasaran pokok.

Konsep 6M diatas merupakan landasan utama untuk sebuah administrasi yang baik dalam menepatkan diri ditengah-tengah birokrasi pemerintahan secara menyeluruh maupun pemerintahan.

Berdasarkan konsep administrasi menunjukkan adanya sejumlah unsur-unsur administrasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kelompok yang bekerja sama memerlukan seperangkat instrument yang saling terkait dan bersinergi. Seperangkat instrumen tersebut berwujud sejumlah unsur yang mutlak harus ada. Artinya tanpa ada unsur-unsur tersebut, tujuan yang telah ditetapkan atau dikehendaki tidak akan tercapai.

2. Konsep Organisasi

Administrasi dan organisasi saling berkaitan satu dengan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai maka perlu adanya tempat (wadah) untuk bekerja sama dan tempat inilah yang dinamakan organisasi. Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan penentuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu pendelegasian wewenang, pengawasan, dan diakhiri dengan pengevaluasian pelaksanaan tugas.

Definisi organisasi menurut Sondang P Siagian dalam bukunya Filsafat Administrasi (edisi revisi) mengemukakan bahwa organisasi merupakan setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara

formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beebrapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Dalam suatu organisasi terdapat sekelompok orang yang melakukan aktivitas dalam sebuah organisasi dengan menggunakan seni tertentu untuk tercapainya tujuan yang telah disepakati melalui orang lain. Administrasi dapat berjalan dengan adanya bantuan dari orang yang mau terlibat didalamnya sebagai manajemen.

Dalam buku Pengantar Manajemen menurut James D.Mooney organisasi yaitu bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Chester I.Barnard mengatakan organisasi adalah sebuah sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Selanjutnya menurut Waldo yang dikutip Silalahi dalam bukunya Studi Administrasi Negara (2011:124) mengatakan organisasi adalah sruktur hubungan-hubungan diantara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi.

Menurut Zulkifli (2005:131) yang mengatakan bahwa sebuah organisasi sebagai sistem apapun bentuk dan jenisnya adalah bersifat dinamis dan terbuka. Terbuka karena tidak mungkin menghindari dari berbagai bentuk pengaruh perubahan yang dating dari aspek lingkungan, terutama lingkungan eksternal.

Sedangkan menurut Nawawi (2008:13) mengatakan bahwa dalam sebuah organisasi terdapat unsur-unsur yang merupakan suatu kesatuan yang utuh agar

sebuah organisasi dapat berjalan, adapun unsur-unsur pokok dalam sebuah organisasi adalah:

- a. Manusia, yaitu yang terdiri dari dua orang atau lebih yang menghimpun diri dalam satu wadah.
- b. Filsafat, yaitu manusia yang menghimpun diri dari organisasi dengan hakekat kemanusiaannya, menjalani kehidupan bersama berdasarkan filsafat yang sama.
- c. Proses, yaitu kerja sama dalam sebuah organisasi yang berlangsung secara berkelanjutan.
- d. Tujuan, yaitu organisasi didirikan oleh manusia karena adanya kesamaan kepentingan, baik dalam rangka mewujudkan hakekat kemanusiaannya maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhannya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui untuk mempertahankan kelangsungan hidup suatu organisasi ditengah-tengah perubahan lingkungan agar tetap bisa eksis maka suatu organisasi membutuhkan suatu strategi pengelolaan sumber daya ilmu yaitu manajemen. Jelaslah bahwa suatu organisasi tidak dapat bergerak sendiri, harus ada interaksi di dalam dan ke luar dalam pelaksanaan fungsi dan tugas sehari-hari dengan saling mendukung antara satu samalainnya, baik antara orang-orang yang ada dalam organisasi maupun dengan organisasi lain atau instansi lain yang berada di luarnya.

3. Konsep Manajemen

Suatu organisasi jika ingin tetap berjalan lancar, maka memerlukan suatu ilmu untuk mempertahankan serta menjalankan organisasi tersebut. Ilmu dan strategi tersebut terdapat dalam konsep manajemen. Dimana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya pencapaian tujuan dengan mendayagunakan serta mengoptimalkan bantuan dan kemampuan orang lain untuk melakukan aktivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

S.P Siagian mendefinisikan pengertian manajemen dalam bukunya Filsafat Administrasi (edisi revisi) manajemen merupakan proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

Edgar H.Scheinj dalam bukunya berjudul *Organization Socialization and the Profesional of Manajemen* menguraikan karakteristik atau kriteria-kriteria sesuatu bisa dijadikan suatu profesi, yaitu:

- a. Para professional membuat keputusan atas dasar prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam situasi dan lingkungan, hal ini banyak ditunjang dengan banyaknya pendidikan-pendidikan professional. Misalnya Akademi Pendidikan Profesi Manajemen, Kursus-kursus dan program-program latihan dan lain sebagainya.

- b. Para profesi memperoleh status dengan cara mencapai suatu standar prestasi kerja tertentu, ini tidak didasarkan pada ketentuan, favorititas, suku bangsa, agama dan kriteria-kriteria lainnya.
- c. Para professional harus ditentukan oleh suatu kode etik yang kuat.

Kemudia menurut Manullang (Atik dan Ratminto, 2012:1) mendefinisikan manajemen sebagai suatu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penyusunan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Fungsi manajemen adalah elemen-elemen dasar yang selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan.

Menurut George R. Terry (dalam Zulkifli) fungsi dari manajemen adalah sebagai berikut:

1. *Planning* (perencanaan) yaitu penentuan serangkaian tindakan dan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan.
2. *Organizing* (organisasi) yaitu pengelompokan kegiatan untuk mencapai tujuan, termasuk dalam hal ini penetapan susunan organisasi, tugas dan fungsinya.
3. *Leading* yaitu pekerjaan manajer untuk meminta orang lain agar bertindak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
4. *Controlling* (pengawasan) yaitu penemuan dan penetapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan.

Dalam manajemen terdapat manajemen publik, manajemen publik secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Menurut Sangkala manajemen publik merupakan penggabungan antara orientasi normatif dan administrasi publik tradisional dengan orientasi instrumental dari manajemen umum. Sedangkan menurut Keban, manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek umum organisasi, dan merupakan gabungan antara fungsi manajemen seperti *planning*, *organizing*, dan *controlling* di satu sisi, dengan sumber daya manusia, keuangan, fisik, informasi, dan politik di sisi lain.

Manajemen dibutuhkan oleh semua orang atau organisasi. Tanpa manajemen usaha untuk mencapai suatu tujuan akan sia-sia belaka. Alasan diperlukannya manajemen adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan pribadi, kelompok, organisasi, atau perusahaan.
- b. Manajemen dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan diantara tujuan, sasaran, kegiatan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi atau perusahaan, seperti pengusaha dan karyawan, kreditur dan nasabah, atau masyarakat dengan pemerintah.
- c. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai efisiensi dan produktifitas kerja organisasi atau perusahaan.

Berdasarkan pengertian manajemen yang telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan pengendalian serta pengawasan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sumber-sumber daya lainnya untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah ditentukan

4. Konsep Kebijakan Publik

Dalam ruang lingkup pemerintahan kebijakan sering dikaitkan dengan kebijakan publik. Berdasarkan berbagai kepustakaan data diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengtur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya.

Menurut William N.Dunn dalam Pasolong (2016:9) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

James E.Anderson dalam Sugandi (2011:79) mengartikan kebijakan public sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Kebijakan publik mencakup elemen-elemen penting yaitu kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu, kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah, kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan, kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu

masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu) serta kebijakan selalu berdasarkan peraturan perundangan tertentu yang bersifat memaksa.

Kemudian menurut Young dan Quinn (dalam Suharto, 2005:44) mengemukakan beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik, sebagai berikut:

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang, kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata, kebijakan publik berupaya merespon masalah/kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang disebut untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan publik bias juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktif. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-

langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan dalam kebijakan publik bias dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.

Menurut Dunn (dalam Nugroho 2007:10), tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Fase penyusunan agenda, pada fase ini pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah kebijakan pada agenda publik.
- b. Fase formulasi kebijakan untuk mengatasi masalah.
- c. Adopsi kebijakan, alternative kebijakan dipilih dan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas atau konsensus kelembagaan.
- d. Implementasi kebijakan, kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisir sumber daya yang dimilikinya terutama finansial dan manusia.
- e. Penilaian kebijakan, pada fase ini membuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan akan dinilai apakah telah memenuhi kebijakan yang telah ditetapkan.

Berikut ini analisis kebijakan menurut Dunn (dalam Nugroho,2007:16), antara lain:

- a. Perumusan masalah, masalah kebijakan adalah nilai kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Fase-fase perumusan

masalah kebijakan antara lain: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah, pengenalan masalah.

- b. Peramalan masa depan kebijaksanaan, peramalan adalah prosedur untuk membuat informasi aktual atas dasar informasi yang telah ada mengenai situasi sosial di masa depan tentang masalah kebijakan. Peramalan mempunyai sejumlah tatanan, yaitu: akurasi ramalan, kondisi komperatif masa depan dan konteks, yaitu konteks institusional, konteks temporal, dan konteks historal.
- c. Rekomendasi kebijakan, yaitu penentuan alternative yang terbaik. Terdapat enam kriteria untuk merekomendasi kebijaksanaan, antara lain: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas pada penciptaan premis-premis nilai dan kelayakan.
- d. Pemantauan hasil kebijaksanaan, yaitu untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat kebijakan publik. Pemantauan mempunyai empat fungsi, yaitu: eksplanasi akuntansi, pemeriksaan dan kepatuhan.
- e. Penilaian (evaluasi) kinerja kebijakan, yaitu menekankan pada penciptaan premis-premis nilai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan “apa perbedaan yang dibuat?”. Kriteria untuk mengevaluasi kebijakan, antara lain: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan suatu kebijakan yang telah dibuat, maka dibutuhkan strategi dan formulasi yang baik. Formulasi dari kebijakan publik adalah langkah awal dalam proses kebijakan publik yang sangat menentukan bagi implementasi kebijakan, menurut Person (dalam Dahlan 2004:97).

Secara metodologis klasifikasi pendekatan dalam formulasi kebijakn publik terdiri dari lima pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan kekuasaan (*power approach topolicy*)
2. Pendekatan rasionalitas (*rationality and policy making*)
3. Kekuasaan dalambirokrasi (*public choice approach*)
4. Pembuatan kebijakn (*personality*)
5. Proses pembuatan kebijakan (*formation lochitian and processingin policy making*)

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkain keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memecahkan suatu masalah tertentu yang terjadi di masyarakat dan bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

Untuk mengukur suatu keberhasilan atau suatu kebijakan tidak terlepas dari proses implementasinya. Implementasi kebijakan mengutip pendapat Van Meter dan Van Horn adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dankelompok-kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan.

5. Konsep Pelaksanaan

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi yang paling mendasar. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi

pelaksanaan justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Pelaksanaan juga disebut pergerakan, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, merumuskan pengertian pelaksanaan atau pergerakan sebagai upaya agar tiap pegawai atau anggota organisasi memiliki keinginan dan berusaha dalam suatu program atau proyek (dalam Admisasmita, 2011;14).

Menurut Westa, dkk (dalam admisasmita, 2011;24) merumuskan pelaksanaan sebagai usaha-usaha untuk melaksanakan rencana yang telah di rumuskan, juga sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Menurut Tjokroadimudjoyo (dalam Adisasmita) pelaksanaan merupakan suatu proses, dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Hamdi, 2014;99) pelaksanaan merupakan semua tindakan oleh perorangan atau kelompok public atau privat yang diarahkan pada perwujudan tujuan yang telah diterapkan terlebih dahulu dalam keputusan kebijakan.

Dalam pelaksanaan tugas tentu saja tidak berdiri dengan sendirinya, tinggi rendahnya tingkat keberhasilan pekerjaan ditentukan dan dipengaruhi oleh beberapa

factor pendukung. Pelaksanaan tugas juga tidak terletak pada sistematis pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab, serta anggapan dan hubungan kerja saja tetapi factor manusia harus memiliki kemampuan dan kesungguhan kerja dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diembannya.

Van Menter dan Van Horn dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi.

2. Sumber daya

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.

3. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.

4. Karakteristik agen pelaksana

Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk di dalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

5. Kondisi sosial, sekonomi dan politik

Kondisi sosial, sekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

6. Disposisi implementor

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu:

- a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
- b. Kognisi, yakni pemahannya terhadap kebijakan
- c. Intensitas disposisi impelemntor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan, yaitu standard dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik, dan disposisi implementor. Dengan demikian masing-masing variabel merupakan faktor yang signifikan yang saling mempengaruhi untuk tercapainya kinerja pelaksanaan kebijakn tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah serangkaian kegiatan atau usaha-usaha yang dilakukan untuk menjalankan semua kebijakan atau program yang telah dibuat dan ditetapkan.

6. Konsep program pembangunan jaringan gas rumah tangga

Berdasarkan buku pembangunan jaringan gas rumah tangga yang disusun oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menjelaskan bahwa

pembangunan jaringan gas rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih dan murah serta program komplementer konversi minyak tanah ke gas LPG untuk percepatan pengurangan penggunaan minyak bumi. Melalui program ini, masyarakat diharapkan mendapatkan bahan bakar yang lebih bersih, aman, dan murah.

Pembangunan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga merupakan salah satu program prioritas nasional yang bertujuan untuk diversifikasi energi, pengurangan subsidi, penyediaan energi bersih dan murah. Kementerian ESDM mengemban amanat menyediakan jaringan gas bumi untuk rumah tangga secara gratis kepada masyarakat. Pembangunan jaringan gas rumah tangga ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah karena lebih hemat dibandingkan penggunaan gas LPG.

Jaringan gas rumah tangga ini bisa dimanfaatkan untuk Memasak. Memasak menjadi lebih praktis dan mudah hanya dengan membuka keran di peralatan memasak seperti kompor, oven, dan alat pemanggang makanan. Untuk tips aman dan hemat pada saat memasak menggunakan jaringan gas rumah tangga, gunakan selang fleksibel yang berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI) dan ganti selang secara rutin. Pastikan nyala api berwarna biru terang yang berarti pembakaran terjadi sempurna sehingga memasak menjadi lebih hemat.

Adapun keuntungan yang akan didapatkan masyarakat dengan menggunakan jaringan distribusi gas rumah tangga diantaranya :

1. Pasokan gas terjamin 24 jam sehingga tidak harus mencari LPG di toko-toko
2. Dapat menikmati energi yang bersih
3. Hemat biaya
4. Proses pembayaran yang mudah melalui Indomaret, Alfamart, Tokopedia, ATM BRI, Mandiri, BCA, BTN, dan Payment Point Online Bank (PPOB) setempa
5. Lebih praktis karena tidak memerlukan tempat penyimpanan
6. Lebih aman karena memiliki tekanan gas lebih rendah dibandingkan dengan tekanan gas dalam tabung LPG

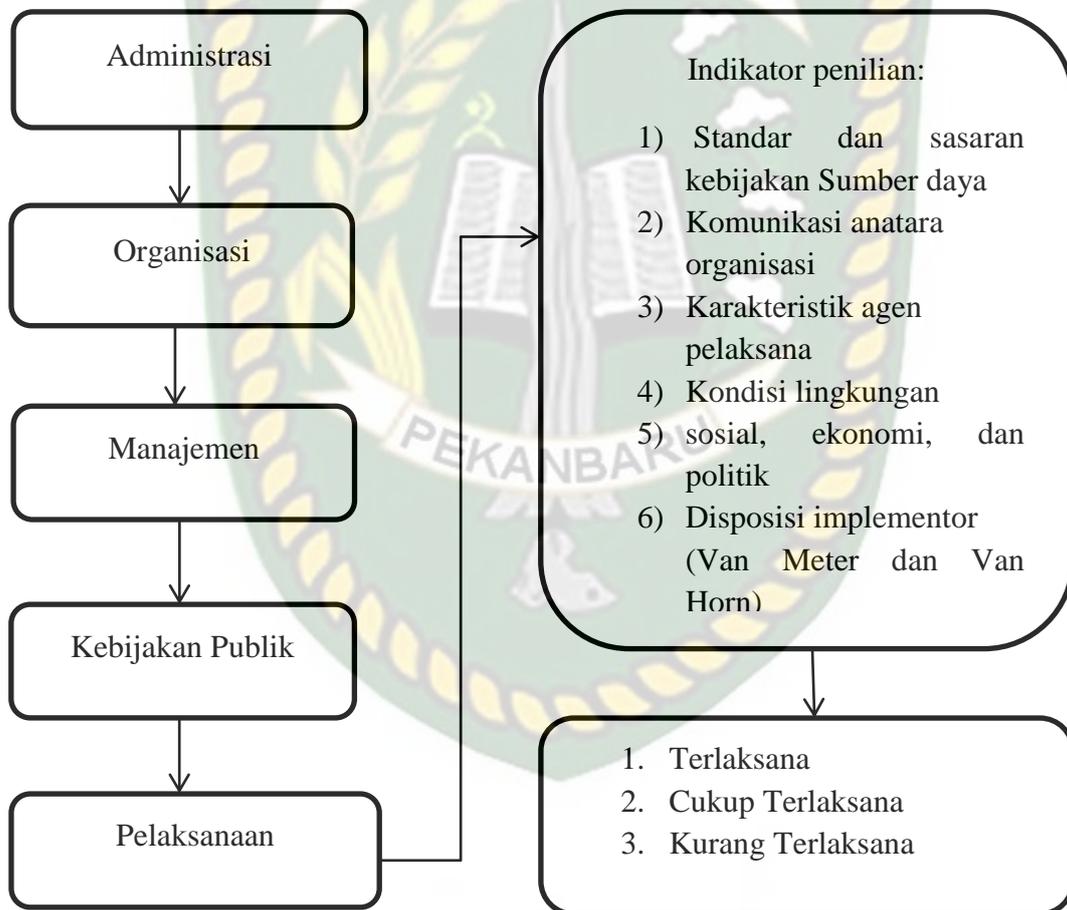
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penggunaan jaringan gas lebih efisien dibandingkan dengan menggunakan LPG karena bersifat ramah lingkungan, tidak memerlukan tempat khusus untuk penyimpanan, memiliki tekanan gas yang lebih rendah serta penggunaannya hemat biaya. Masyarakat yang telah menggunakan jaringan gas juga ikut membantu negara untuk tidak mengimpor lebih banyak LPG. Lebih aman karena memiliki tekanan gas lebih rendah dibandingkan dengan tekanan gas dalam tabung LPG.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator, berdasarkan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan. Berdasarkan dari variabel penelitian “Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru” kemudian mengacu pada suatu teori yaitu menurut Van Meter dan Van Horn mengenai teori implementasi yang dijadikan

indikator serta fenomena yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis menjelaskan unsur diatas agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penafsiran makna dan menyimpulkan maksud peneliian. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pikir tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru



(Sumber Modifikasi Penulis, 2020)

C. Konsep Operasional

Untuk menghindari dan menghilangkan pemahaman mengenai beberapa konsep maupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa konsep operasional sebagai berikut:

1. Administrasi adalah seluruh proses kerjasama antar dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
2. Organisasi adalah wadah berhimpun sejumlah manusia karena memiliki kepentingan yang sama dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sama.
3. Manajemen adalah suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan juga sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain.
4. Kebijakan publik adalah rangkaian pilihan-pilihan yang berhubungan, dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.
5. pelaksanaan adalah tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan

tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial.

6. Standar dan sasaran kebijakan adalah untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.
7. Sumber daya adalah keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan memanfaatkan sumber daya manusia biaya dan waktu. Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
8. Komunikasi anatar organisasi, komunikasi memegang perana penting bagi berlangsungnya koordinasi implementai kebijakan, semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi dan begitu pula sebaliknya.
9. Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan dilandasi dengan sikap disiplin.
10. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik, lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial dan politik yang juga merupakan faktor menentukan keberhasilan suatu implementasi.

11. Disposisi implementor, keberhasilan kebijakan bias dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan pelaksana kebijakan.

D. Operasional Variabel

Untuk memberikan penjelasan arah dan maksud dari penelitian ini, penulis merumuskan konsep operasinalisasi variabel berdasarkan konsep dan teori yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya mengenai konsep operasinalisasi variael dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel II.1 Operasional Variabel Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga Di Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala
Pelaksanaan kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya (Van Meter dan Van Horn)	Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas di Kota Pekanbaru	1. Standar dan sasaran kebijakan	a. Standar kebijakan program jaringan gas rumah tangga b. Sasaran kebijakan program jaringan gas rumah tangga	a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana
		2. Sumber daya	a. SDM yang ada pada Program jaringan gas rumah tangga b. Fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan jaringan gas rumah tangga	a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana
		3. Komunikasi antar organisasi	a. Komunikasi yang dilakukan dalam program jaringan gas rumah tangga b. Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pencegahan jika terjadinya kebocoran pada jaringan gas rumah tangga	a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana
		4. Karakteristik agen pelaksana	a. Karakteristik implementor program jaringan gas rumah tangga b. Bekerja sesuai dengan SOP dalam pembangunan jaringan gas rumah tangga	a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana
		5. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik	a. Pengaruh positif di lingkungan sekitar dari program jaringan gas rumah tangga b. pengaruh negatif di lingkungan sekitar dari program jaringan gas rumah tangga	a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana
		6. Disposisi implementor	a. Respon Implementor terhadap kebijakan b. Pemahaman implementor terhadap kebijakan.	a. Terlaksana b. Cukup terlaksana c. Kurang terlaksana

Sumber: Mofikasi Penulis 2020

E. Teknik Pengukuran

Teknik penelitian ini untuk pengukuran dari masing-masing indikator dalam Pelaksanaan Program Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu terlasana, cukup terlaksana kurang terlasana. dan sedangkan untuk pengukurannya menggunakan teknik menggunakan teknik pengukuran *skala likert*, yaitu menurut Sugiyono adalah skala pengukuran yang digunakan untuk mngukur sikap, pendapat, dan persepsi sekelompok orang tentang fenomena-fenomena social yang terjadi di lokasi penelitian. Skala likrt yaitu dengan memberikan nilai skor 3, cukup terlaksana 2, kurang terlaksana 1.

1. Pengukuran Variabel (Responden Pegawai)

$$\text{Interval} = \frac{\text{total skor tertinggi} - \text{total skor terendah} - 1}{\text{jumlah kategori}}$$

Dimana:

$$\text{Total Skor Tertinggi} = \text{Nilai Kategori Tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \\ \times \text{Jumlah Responden}$$

$$\text{Total Skor Terendah} = \text{Nilai Kategori Terendah} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \\ \times \text{Jumlah Responden}$$

$$\text{Total Skor Tertinggi} = 3 \times 12 \times 9 = 324$$

$$\text{Total Skor Terendah} = 1 \times 12 \times 9 = 108$$

$$\text{Interval} = \frac{(324 - 108 - 1)}{3} = 72$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, adapun pengukuran terhadap variabel dari responden pegawai dalam pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota Pekanbaru dengan jumlah responden 9 orang dan 12 pertanyaan yaitu diperoleh untuk responden dengan skor tertinggi 324 dan untuk skor terendah 108 dengan jarak interval 215. Dengan demikian penilaian terhadap variabel dapat dinyatakan sebagai berikut:

- Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru berada pada interval nilai skor 253-324
Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden
- Cukup Terlaksana : untuk kuesioner mengenai indikator pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru berada pada interval nilai skor 181- 252
Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden
- Kurang Terlaksana : untuk kuesioner mengenai indikator pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru berada pada interval nilai skor 108- 180

2. Pengukuran Indikator (Responden Pegawai)

$$\text{Interval} = \frac{\text{total skor tertinggi} - \text{total skor terendah} - 1}{\text{jumlah kategori}}$$

Dimana:

$$\text{Total Skor Tertinggi} = \text{Nilai Kategori Tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \\ \times \text{Jumlah Responden}$$

$$\text{Total Skor Terendah} = \text{Nilai Kategori Terendah} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \\ \times \text{Jumlah Responden}$$

$$\text{Total Skor Tertinggi} = 3 \times 2 \times 9 = 54$$

$$\text{Total Skor Terendah} = 1 \times 2 \times 9 = 18$$

$$\text{Interval} = \frac{(54 - 18 - 1)}{3} = 12$$

Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru, kriteria pengukurannya adalah:

1. Standar dan sasaran kebijakan. Diajukan 2 pertanyaan dengan 9 responden dengan skor pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru, skor tertinggi 54 dan skor terendah 18 dengan interval skor 12 kemudian dinyatakan :

Terlaksana :Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator

standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 44-54

Cukup Terlaksana Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 31-43

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skoryang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 18-30

2. Sumber daya. Diajukan 2 pertanyaan dengan 9 resonden dengan skor pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru, skor tertinggi 54 dan skor terendah 18 dengan interval skor 12 kemudian dinyatakan :

Terlaksana :Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 44-54

Cukup Terlaksana Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator

standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 31-43

Kurang Terlaksana

Jika jumlah skoryang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 18-30

3. Komunikasi antar organisasi. Diajukan 2 pertanyaan dengan 9 responden dengan skor pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru, skor tertinggi 54 dan skor terendah 18 dengan interval skor 12 kemudian dinyatakan :

Terlaksana

:Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 44-54

Cukup Terlaksana

Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 31-43

Kurang Terlaksana

Jika jumlah skoryang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas

rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 18-30

4. Karakteristik agen pelaksana. Diajukan 2 pertanyaan dengan 9 responden dengan skor pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru, skor tertinggi 54 dan skor terendah 18 dengan interval skor 12 kemudian dinyatakan :

Terlaksana :Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 44-54

Cukup Terlaksana Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 31-43

Kurang Terlaksana Jika jumlah skoryang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 18-30

5. Kondisi Lingkungan social, ekonomi, dan politik. Diajukan 2 pertanyaan dengan 9 responden dengan skor pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru, skor tertinggi 54 dan skor terendah 18 dengan interval skor 12 kemudian dinyatakan :

Terlaksana :Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 44-54

Cukup Terlaksana Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 31-43

Kurang Terlaksana Jika jumlah skoryang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 18-30

6. Disposisi implementor. Diajukan 2 pertanyaan dengan 9 responden dengan skor pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru, skor tertinggi 54 dan skor terendah 18 dengan interval skor 12 kemudian dinyatakan :

Terlaksana	:Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 44-54
Cukup Terlaksana	Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 31-43
Kurang Terlaksana	Jika jumlah skoryang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 18-30

1. Pengukuran Variabel (Responden Masyarakat)

$$\text{Interval} = \frac{\text{total skor tertinggi} - \text{total skor terendah} - 1}{\text{jumlah kategori}}$$

Dimana:

$$\text{Total Skor Tertinggi} = \text{Nilai Kategori Tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \\ \times \text{Jumlah Responden}$$

$$\text{Total Skor Terendah} = \text{Nilai Kategori Terendah} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \\ \times \text{Jumlah Responden}$$

$$\text{Total Skor Tertinggi} = 3 \times 12 \times 95 = 3.420$$

$$\text{Total Skor Terendah} = 1 \times 12 \times 95 = 1.140$$

$$\text{Interval} = \frac{(3.420 - 1.140 - 1)}{3} = 760$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, adapun pengukuran terhadap variabel dari responden masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota Pekanbaru dengan jumlah responden 95 orang dan 12 pertanyaan yaitu diperoleh untuk responden dengan skor tertinggi 3.420 dan untuk skor terendah 1.140 dengan jarak interval 760. Dengan demikian penilaian terhadap variabel dapat dinyatakan sebagai berikut:

- Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru berada pada interval nilai skor 2.661-3.420
- Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden
Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru berada pada interval nilai skor 1.901-2.660
- Kurang Terlaksana :

Jika jumlah skor yang diperoleh dari seluruh responden untuk kuesioner mengenai indikator pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru berada pada interval nilai skor 1.140-1.900

2. Pengukuran Indikator (Responden masyarakat)

$$\text{Interval} = \frac{\text{total skor tertinggi} - \text{total skor terendah} - 1}{\text{jumlah kategori}}$$

Dimana:

$$\text{Total Skor Tertinggi} = \text{Nilai Kategori Tertinggi} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \\ \times \text{Jumlah Responden}$$

$$\text{Total Skor Terendah} = \text{Nilai Kategori Terendah} \times \text{Jumlah Pertanyaan} \\ \times \text{Jumlah Responden}$$

$$\text{Total Skor Tertinggi} = 3 \times 2 \times 95 = 570$$

$$\text{Total Skor Terendah} = 1 \times 2 \times 95 = 190$$

$$\text{Interval} = \frac{(570 - 190 - 1)}{3} = 126$$

Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru, kriteria pengukurannya adalah:

1. Standar dan sasaran kebijakan. Diajukan 2 pertanyaan dengan 95 responden dengan skor pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota

pekanbaru, skor tertinggi 570 dan skor terendah 190 dengan interval skor 126 kemudian dinyatakan :

Terlaksana :Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 443-570

Cukup Terlaksana Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 317-442

Kurang Terlaksana Jika jumlah skoryang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 190-316

2. Sumber daya. Diajukan 2 pertanyaan dengan 95 responden dengan skor pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru, skor tertinggi 570 dan skor terendah 190 dengan interval skor 126 kemudian dinyatakan :

Terlaksana :Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator

standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 443-570

Cukup Terlaksana Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 317-442

Kurang Terlaksana Jika jumlah skoryang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 190-316

3. Komunikasi antar organisasi. Diajukan 2 pertanyaan dengan 95 resonden dengan skor pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru, skor tertinggi 570 dan skor terendah 190 dengan interval skor 126 kemudian dinyatakan :

Terlaksana :Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 443-570

Cukup Terlaksana Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan

gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 317-442

Kurang Terlaksana

Jika jumlah skoryang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 190-316

4. Karakteristik agen pelaksana. Diajukan 2 pertanyaan dengan 95 resonden dengan skor pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru, skor tertinggi 570 dan skor terendah 190 dengan interval skor 126 kemudian dinyatakan :

Terlaksana

:Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 443-570

Cukup Terlaksana

Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 317-442

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skoryang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 190-316

5. Kondisi lingkungan social, ekonomi, dan politik. Diajukan 2 pertanyaan dengan 95 resonden dengan skor pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru, skor tertinggi 570 dan skor terendah 190 dengan interval skor 126 kemudian dinyatakan :

Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 443-570

Cukup Terlaksana : Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 317-442

Kurang Terlaksana : Jika jumlah skoryang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator

standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 190-316

6. Disposisi Implementor. Diajukan 2 pertanyaan dengan 95 responden dengan skor pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru, skor tertinggi 570 dan skor terendah 190 dengan interval skor 126 kemudian dinyatakan :

Terlaksana :Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 443-570

Cukup Terlaksana Jika jumlah skor yang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 317-442

Kurang Terlaksana Jika jumlah skoryang diperoleh dari kuesioner mengenai pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di kota pekanbaru pada sub indikator standard dan sasaran kebijakan berada pada interval nilai skor 190-316

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam suatu penelitian, peneliti harus menggunakan jenis penelitian yang tepat. Hal ini dimaksud agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi serta langkah-langkah yang digunakan dalam mengatasi masalah tersebut.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu jenis penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Menurut Sugiyono (2015:13) metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan.

Alasan peneliti menggunakan metode kuantitatif karena ingin mengkaji lebih mendalam mengenai gejala, peristiwa dan kajian dalam lingkungan yang alami dalam populasi dan sampel penelitian. Untuk mendapatkan data dan keterangan yang mendukung dalam penelitian ini, penulisan menggunakan metode angket. Prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggunakan

data-data yang dikumpulkan dari objek penelitian pada saat penulis megumpulkan data kelapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Sail. Alasan dipilihnya lokasi tersebut adalah karena kecamatan tersebut merupakan daerah yang paling banyak jumlah saluran jaringan gas rumah tangga yaitu sebanyak 1.770 saluran rumah di tiga kelurahan yaitu kelurahan Suka Mulya, Suka Maju, dan Cinta Raja, pada tahun 2018 di kota Pekanbaru. Namun masih banyak permasalahan yang ditemukan seperti yang telah dijelaskan pada fenomena masalah di bagian latar belakang.

C. Populasi dan sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018;80). Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek atau subyek tersebut.

Sedangkan sampel merupakan bagian dari mjumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018;81). Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada pupulasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka peneliti dapat menggunakan

sampel yang diambil dari populasi tersebut. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar dapat mewakili. Untuk lebih jelasnya populasi dan sampel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1. Populasi dan Sampel Sumber Informan Dalam Penelitian

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel
1.	Kepala bidang energi gas di dinas ESDM kota Pekanbaru	1	1
Jumlah		1	1

(Sumber: data olahan penulis 2020)

Tabel III.1. Populasi dan Sampel Pegawai dan Masyarakat Dalam Penelitian

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel
1.	Pegawai di Kantor PT.SPEM Kota Pekanbaru	8	8
2.	Kepala Camat di Kantor Camat Sail Kota Pekanbaru	1	1
3.	Masyarakat Kecamatan Sail	1.770	95
Jumlah		1779	104

(Sumber: data olahan penulis 2020)

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam setiap penelitian teknik penarikan sampel disesuaikan dengan populasinya. Berdasarkan pertimbangan untuk menentukan sampel responden pegawai di kantor PT.SPEM kota Pekanbaru dan kepala camat Sail peneliti menggunakan teknik sensus, penggunaan teknik ini berlaku jika populasi relative kecil dan dapat dijangkau. Untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat maka peneliti mengambil seluruh jumlah populasi pegawai di kantor PT. SPEM yaitu sebanyak 8 orang dan kepala kantor Camat Sail 1 orang.

Kemudian untuk menentukan sampel pada masyarakat kecamatan sail yang menggunakan jaringan gas rumah tangga, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu penarikan sampel berdasarkan atas penilaian atau tujuan tertentu saja dan dianggap sudah mewakili dari keseluruhan populasi masyarakat kecamatan sail yang menggunakan jaringan gas rumah tangga yaitu sebanyak 1.770 orang, peneliti membatasi sampel menjadi 95 orang. Hasil ini didapatkan dari pencarian menggunakan rumus $n = \frac{N}{1 + N \cdot e}$. Maka jumlah keseluruhan sampel peneliti menjadi 104 orang. Dengan jumlah sampel ini peneliti tidak memakan waktu yang lama untuk melakukan penelitian dan penyebaran kuesioner.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berupa opini subjek (orang) secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kegiatan atau kejadian, dan hasil pengujian. Pengambilan data tersebut berupa hasil dari wawancara dan pengamatan pada pihak-pihak yang terkait atau informan dari PT. Sarana Pembangunan Energi Madani Kota Pekanbaru.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang didapat dari hasil dokumentasi terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan penelitian

serta data yang di dapat dari berbagai macam media elektronik maupun media cetak.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu langkah yang dilakukan untuk mendapatkan data sebagai pendukung dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner (angket)

Kuesioner merupakan instrument untuk pengumpulan data, dimana partisipan atau responden mengisi pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh peneliti (Sugiyono, 2016).

2. Wawancara (*interview*)

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2016:31) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan mewawancarai sumber-sumber informasi yaitu informan penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Implementasi Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru.

3. Observasi

Menurut Nasutin dalam Sugiyono (2016:226) observasi atau pengamatan didefinisikan sebagai perhatian yang focus terhadap gejala, kejadian, artau sesuatu. Observasi digunakan untuk mengumpulkan data primer, dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

4. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2008:82) dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pencatatan dan pengumpulan data, yang diidentifikasi dari dokumentasi adalah yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti penulis. Dokumentasi merupakan bukti fisik dari penelitian ini, berupa foto-foto penelitian dan surat-surat yang telah diperoleh selama penulis melakukan penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono (2016:244) analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, gambar atau foto, dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola serta memilih mana yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah pengumpulan data dilakukan maka data hasil kuisisioner dikelompokkan menurut jenisnya, dan selanjutnya data tersebut dideskripsikan secara terperinci dan sistematis. Kemudian data dianalisis dan diinterpretasikan secara kuantitatif berlandaskan konsep dan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, untuk kemudian dapat diperoleh suatu kesimpulan dari hasil penelitian.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian ini untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Table III.3 Jadwal Waktu dan Kegiatan Penelitian tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru

No	Kegiatan	Bulan Minggu ke Tahun 2019																							
		Agustus – September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP																								
2.	Seminar UP																								
3.	Riset																								
4.	Penelitian Lapangan																								
5.	Pengelolaan Analisis Data																								
6.	Konsultasi Bimbingan Skripsi																								
7.	Ujian Skripsi																								
8.	Revisi dan Pengesahan Skripsi																								
9.	Penggandaan dan Penyerahan Skripsi																								

Sumber : modifikasi penulis 2020

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian Timur Pulau Sumatera dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang didirikan oleh para pedagang Minang-kabau di tepi Sungai Siak. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Sultan Siak ke-4 Sultan Alamuddin Syah memindahkan pusat kekuasaan Siak dari Mempura ke Senapelan pada tahun 1762. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan

musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini.

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1* tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus landschap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibu kota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut *gokung*.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatra di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatra Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25

sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau. Pada waktu itu berupa dusun yang bernama: Dusun payang sekaki yang terletak ditepi sungai Siak diseberang pelabuhan. Sewaktu penduduk Jepang, Pekanbaru menjadi *Gun* yang dipakai oleh *Gun Cho* dan tempat kedudukan Riau *Syutjoukang*. Akhirnya Pemerintah Republik Indonesia berubah status menjadi: Hermente Pekanbaru Ibu Kota Keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 01 Mei tahun 1946.

1. Kota kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1975
2. Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1974

Pekanbaru merupakan sebuah kota yang terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Posisi sangat mendukung untuk menjadikan Pekanbaru sebagai sebuah kota transit baik dari maupun menuju kota-kota lain. Dengan bujur Timur yang terletak pada titik 101-36 dan 0-35 Lintang Utara, menjadikan Pekanbaru sebagai daerah yang memiliki ketinggian 5-10 meter dari permukaan laut.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas kota Pekanbaru dikembangkan dari 62.96 km dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pertimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003 beberapa Kecamatan di Pekanbaru kembali dimekarkan. Kecamatan yang dimekarkan antara lain, Kecamatan Payung Sekaki yang

merupakan pemekaran dari kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan kota Pekanbaru mencapai 632,36 km². Dan untuk mengetahui secara rinci luas dari masing-masing Kecamatan di Daerah Kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui table berikut:

Table IV.1. Luas Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru

No	Kecamatan	Luas (km)	Persentase
1.	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
2.	Senapelan	6,65	1,05
3.	Sukajadi	5,10	0,81
4.	Limapuluh	4,04	0,64
5.	Sail	3,26	0,52
6.	Rumbai	105,23	16,64
7.	Rumbai Pesisir	96,75	15,30
8.	Bukit Raya	94,56	14,96
9.	Tenayan Raya	108,84	17,21
10.	Marpoyan Damai	89,86	14,21
11.	Tampan	63,08	9,98
12.	Payung Sekaki	52,63	8,32
JUMLAH		632, 26	100,00

Sumber: Statistik Kota Pekanbaru, 2018

Dari table di atas dapat terlihat bahwa kecamatan terluas di kota Pekanbaru adalah Kecamatan Tenayang Raya dengan luas 108,84 km. Sedangkan kecamatan

terkecil atau tersempit adalah Kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas wilayah 2,26 km.

Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatra, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Di kota Pekanbaru terdapat beberapa etnis, seperti Minangkabau, Melayu, Jawa, Batak, Tionghoa dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada table berikut:

Table IV.2. Beberapa Etnis di Kota Pekanbaru

No	Etnis	Jumlah (%)
1.	Minangkabau	40,96
2.	Melayu	23,10
3.	Jawa	15,70
4.	Batak	11,94
5.	Tionghoa	2,5
6.	Lain-lain	6,7

Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekanbaru

Dari table tersebut dapat dilihat bahwa Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 40,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai bahasa pergaulan yang umum digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru, selain Bahasa Indonesia. Selain itu, etnis yang memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Batak. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru tahun 1959,

memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau.

Dan Etnis yang paling sedikit adalah Tionghoa dengan jumlah 2,5%. Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang.

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi. Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat Batak.

Dengan jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan pembangunan yang sangat cepat maka diperlukan pendidikan untuk menggerakkan pembangunan tersebut. Pendidikan memang memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan dan kemajuan yang berbicara tentang disiplin keilmuan formal, di dalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk kota Pekanbaru merupakan salah satu hal yang patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan, Pekanbaru menjadi tujuan masyarakat luar daerah untuk mencari peruntungan. Hal ini terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan banyaknya perumahan, yang kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru saat ini adalah berjumlah sekitar 954.373 jiwa yang terdapat pada 12 Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Table IV.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Pekanbaru tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1.	Pekanbaru Kota	26.645
2.	Senapelan	38.292
3.	Sukajadi	47.672
4.	Limapuluh	43.461
5.	Sail	23.285
6.	Rumbai	68.451
7.	Rumbai Pesisir	69.604
8.	Bukit raya	93.337
9.	Tenayan Raya	136.448

10.	Marpoyan Damai	130.303
11.	Tampan	181.910
12.	Payung Sekaki	94.965
JUMLAH		954.373

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tenayan Raya dengan jumlah penduduk sebanyak 136.448 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil terdapat pada kecamatan Sail yaitu sebanyak 23,285 jiwa.

B. Gambaran Umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

Dengan diberlakukannya UU Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999, Kantor Wilayah Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Riau sebagai Instansi Vertikal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Riau diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau. Dengan demikian terjadi penggabungan Dinas Pertambangan Tk. I Riau dengan Kanwil Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau menjadi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau. Setelah itu dengan adanya Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau beralih nama menjadi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Provinsi Riau dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 44 Tahun 2014

tentang Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dikepalai oleh seorang Kepala Dinas dan dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 1 (satu) orang Kepala Balai Laboratorium dan Peralatan serta kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau secara rinci terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan Program
 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
 3. Sub Bagian Umum
- c. Bidang Data dan Informasi terdiri dari:
 1. Seksi Pendataan
 2. Seksi Pengolahan Data Sistem Informasi Geografis
 3. Seksi Publikasi dan Dokumentasi
- d. Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari :
 1. Seksi Ketenagalistrikan
 2. Seksi Energi Baru Terbarukan
 3. Seksi Konservasi Energi
- e. Bidang Mineral dan Batubara terdiri dari
 1. Seksi Batubara
 2. Seksi Mineral

3. Seksi Konsevasi dan Rehabilitasi Lahan

Adapun visi dan misi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Riau yaitu sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya Pembangunan Pertambangan dan Energi Berwawasan Lingkungan dan Berdaya Saing Tinggi Menuju Masyarakat Riau yang Sejahtera Tahun 2020.

Misi:

1. Mewujudkan Data Informasi Potensi Pertambangan dan Energi yang Lengkap dan Dapat Diandalkan.
2. Mewujudkan Pengaturan dan Pengembangan Pengusahaan Pertambangan dan Energi yang Kompetitif, Kompeten, Standar dan Transparan.
3. Mewujudkan Pembinaan Sumber Daya Manusia di Bidang Pertambangan dan Energi Secara Sosial.
4. Mewujudkan Pengawasan dan pengendalian di Bidang Pertambangan dan Energi Secara Efektif dan Efisien.
5. Mewujudkan Pertambangan Rakyat / Skala Kecil yang Handal.

Adapun Tupoksi yang terdapat didalamnya adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijaksanaan pemerintah daerah dibidang pertambangan dan energi

2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyeleraskan, dan menyasikan kebijaksanaan dan kegiatan pengembangan pertambangan dan energi
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang pertambangan dan energi
4. Melaksanakan rencana kerjadan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan
5. Membantu pembinaan dan pengembangan pertambangan dan energi
6. Menyediakan dukungan/bantuan dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral dan energi air bawah tanah
7. Menyediakan dukungan kerjasama antar kabupaten/kota dalam rangka pengembangan pertambangan dan energi
8. Pemberian izin usaha inti pertambangan umum lintas kabupaten/kota yang meliputi eksplorasi dan eksploitasi
9. Pemberian izin usaha inti listrik dan distribusi lintas kabupaten\kota yang tersambung ke grid nasional
10. Pengelolaan sumber daya mineral dan energi non migas, bahan radioaktif pada laut provinsi (dari 4-12 mil)
11. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan
12. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
13. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pertambangan dan energi
14. Melaksanakan pelatihan dan penelitian dibidang pertambangan dan energi

15. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan gubernur Riau

Berikut adalah beberapa bagian dalam Dinas Energi Sumber Daya Mineral di Kota Pekanbaru:

1. Sekretariat

Sekretaris: ASTRA NUGRAHA,S.STP,M.Si

Tugas Pokok:

Sekretaris mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan Subbagian Umum.

Fungsi:

1. Penyelenggaraan perencanaan pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum;
3. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum;
4. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan serta Subbagian Umum;
5. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Subbagian Perencanaan Program

Tugas Pokok:

1. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan Program berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas ;
4. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;.
6. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Perencanaan Program secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
7. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
8. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan tugas pokok Subbagian Perencanaan Program secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

9. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbagian Perencanaan Program berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
10. Menghimpun data program dan kegiatan dari masing-masing bidang baik secara manual maupun elektronik agar seluruh data program dan kegiatan terhimpun dengan baik;
11. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana program dan laporan;
12. Melaksanakan penyusunan Renstra dan Lakip;
13. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan laporan;
14. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana dan program;
15. Menyiapkan bahan, data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan Program dan Dinas;
16. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan Program berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
17. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris Dinas secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
18. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

Tugas Pokok:

1. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas ;
4. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Keuangan dan Perlengkapan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
7. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
8. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan tugas pokok Subbagian Keuangan dan Perlengkapan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

9. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
10. Mengelola administrasi dan menyusun program kerja Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
11. Menghimpun bahan dan mengumpulkan data usul rencana keuangan dan aset;
12. Melakukan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, pemeliharaan gedung kantor, pengamanan aset, usulan penghapusan aset dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas barang-barang inventaris;
13. Menyiapkan bahan pembinaan, memberikan petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;
14. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelola keuangan dan aset;
15. Melakukan urusan pembendaharawan (pencairan, pembayaran dan surat pertanggungjawaban) serta verifikasi dan administrasi pengelola keuangan dan aset;
16. Mengelola sistem informasi keuangan daerah;
17. Mengelola tata usaha keuangan dan aset menyiapkan pembayaran gaji pegawai;
18. Melaksanakan proses penatausahaan belanja pejabat pengelola keuangan daerah;

19. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengelola keuangan dan aset;
20. Memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
21. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
22. Melaporan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris Dinas secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
23. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. **Subbagian Umum**

Tugas Pokok:

1. Merencanakan program kegiatan pertahun anggaran subbagian umum berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
2. Member tugas pokok kepada bawahan disposisi tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi habis;
3. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas ;

4. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
5. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
6. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Umum secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
7. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Dinas tentang langkah-langkah atau tindakan atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
8. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan tugas pokok Subbagian Umum secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
9. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Subbagian Umum berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
10. Melaksanakan penerimaan, mengadakan dan mendistribusikan surat menyurat;
11. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian penghargaan, penempatan formas, kesejahteraan pegawai, mutasi dan pemberhentian pegawai,

diklat, ujian dinas, izin belajar, pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai serta pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu Istri/ Suami (Karsi/Karsu);

12. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian;
13. Menyusun standar kompetensi pegawai, analisis jabatan, analisis beban kerja, budaya kerja, hukum, kelembagaan, organisasi, dan tatalaksana;
14. Menyiapkan bahan penetapan pengelolaan keuangan daerah, bendahara dan bendaharawan pembantu;
15. Menyelenggarakan urusan kehumasan;
16. Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan, urusan rumah tangga Dinas dan administrasi perjalanan dinas;
17. Mengumpulkan, menyusun, dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
18. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, kemandirian, dan ketertiban kantor;
19. Menatausahakan daftar inventaris, arsip dan dokumentasi;
20. Melaksanakan pengadaan barang yang dibutuhkan setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
21. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Umum berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;

22. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Sekretaris Dinas secara periodik sebagai bahan pertanggungjawaban;
23. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

C. Gambaran Umum Kecamatan Sail

Kecamatan Sail merupakan salah satu dari 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Dengan luas wilayah sebesar 3.26 km², Kecamatan Sail terbagi atas 3 (tiga) Kelurahan yaitu : Kelurahan Sukamaju, Sukamulia, dan Cintaraja, dan memiliki 18 RW dan 76 RT. Secara Spasial Kecamatan Sail memiliki lokasi yang sangat strategis sebagai kecamatan yang memiliki keunggulan sebagai pusat pendidikan. ini dapat dilihat dari beberapa sekolah negeri yang telah menjadi sekolah bertaraf internasional dikecamatan ini. Luas wilayah Kecamatan Sail adalah 3,26 km² dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut:

1. Kelurahan Cinta Raja : 0,87 km²
2. Kelurahan Suka Maju : 1,21 km²
3. Kelurahan Suka Mulia : 1,18 km²

Batas-batas wilayah Kecamatan Sail adalah:

1. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Tenayan Raya
2. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai dan Kecamatan Pekanbaru Kota
3. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Lima Puluh

4. Sebelah Selatan :berbatasan dengan Kecamatan Bukit Raya

Untuk luas wilayah dari masing-masing kelurahan di kecamatan Sail dapat dilihat pada table berikut:

Tabel IV.4. Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah menurut Kelurahan di Kecamatan Sail Tahun 2018

No	Kelurahan	Luas (km ²)	Persentase %
1.	Cinta Raja	0,87	27
2.	Suka Maju	1,21	37
3.	Suka Mulya	1,18	36
JUMLAH		3,26	100

Sumber: Kantor Camat Sail

Dari data pada table di atas dapat dilihat bahwa sebesar 37% luas wilayah di Kecamatan Sail adalah Kelurahan Suka Maju, 36% Kelurahan Suka Mulya, dan 27% Kelurahan Cinta Raja dari keseluruhan wilayah di Kecamatan. Dan dapat pula disimpulkan bahwa wilayah yang paling luas adalah wilayah Kelurahan Suka Maju dengan luas 1,21 km². Dan wilayah yang paling sempit adalah wilayah Kelurahan Cinta Raja dengan luas 0,87 km².

Luas wilayah menurut pengguna lahan di Kecamatan Sail terdiri dari tanah sawah, tanah kering, bangunan atau pekarangan, hutan Negara dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada table berikut:

Table IV.5. Luas Wilayah Menurut Pengguna Lahan dan Kelurahan di Kecamatan Sail (ha)

No	Kelurahan	Tanah Sawah	Tanah Kering	Bangunan/ Pekarangan	Hutan Negara	Lainnya	Jumlah
1.	Cinta Raja	0	13.01	73.99	0	0	87
2.	Suka Maju	0	5.31	115.69	0	0	121
3.	Suka Mulia	0	3.24	114.76	0	0	118
JUMLAH		0	21.56	304.44	0	0	326

Sumber: Kantor Camat Sail

Dari tabel di atas dapat dilihat Kelurahan Suma Maju merupakan Kelurahan terbesar menurut jenis penggunaan lahan dengan jumlah 121 ha, dengan rincian tanah kering 5.31 ha dan bangunan/pekarangan 115.69 ha. Sementara kelurahan Suka Mulia sebesar 118 ha, dengan rincian tanah kering 3.24 ha, bangunan/pekarangan 14.76 ha. Dan kelurahan Cinta Raja merupakan kelurahan terkecil menurut jenis penggunaan lahannya dengan jumlah 87 ha, tanah kering sebesar 13.01 ha, dan bangunan pekarangan sebesar 73.99 ha. Jumlah total jenis penggunaan lahan di Kecamatan Sail sebesar 326 ha.

Jumlah penduduk Kecamatan Sail mencapai 21 485 jiwa pada tahun 2018. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,03 persen dari tahun 2017. Kepadatan penduduknya mencapai 6 590 jiwa/km², dengan kelurahan terpadat adalah Cinta Raja sebesar 7 392 jiwa/km². Untuk melihat perbandingan jumlah penduduk dari kelurahan di kecamatan Sail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.6. Perbandingan Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Sail Tahun 2018

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Cinta Raja	2.879	3.641	6.520

2.	Suka Maju	4.278	4.092	8.370
3.	Suka Mulia	3.570	3.025	6.595
JUMLAH		10.727	10.758	21.485

Sumber: Kantor Camat Sail

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk terbanyak terdapat pada Kelurahan Suka Maju dengan jumlah 8.370 jiwa, dengan jumlah terbanyak pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 4.278 jiwa sedangkan jumlah jenis kelamin perempuan sebanyak 4.092 jiwa. Sedangkan kelurahan yang paling sedikit jumlah penduduknya terdapat pada kelurahan Suka Mulia dengan jumlah sebanyak 6.595 jiwa, dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 3.570 jiwa dan perempuan sebanyak 3.025 jiwa.

Kecamatan sail merupakan kecamatan ke dua yang dapat merasakan program jaringan gas rumah tangga di kota Pekanbaru. Pada tahun 2015 tahap pertama pembangunan jaringan gas dibangun di kecamatan Limapuluh kemudian pembangunan jaringan gas alam diperluas ke Kecamatan Sail. Pengerjaan galian untuk pipa gas juga sudah dilakukan dan juga telah dilakukan uji coba kompresor di halaman Kantor Camat Sail. Uji coba ini dilakukan untuk mencegah kebocoran yang terjadi di saat aliran gas alam sudah mulai didistribusikan melalui pipa-pipa yang sudah tertanam di bawah tanah. Pengecekan menggunakan tekanan udara yang sengaja dimasukan ke dalam kompresor untuk melihat apakah terdapat celah dalam saluran kompresor dengan menuangkan cairan sabun di segala sisinya.

Jumlah gas alam yang nantinya akan didistribusikan kepada masyarakat akan berpusat terlebih dulu pada regulator system yang ada di setiap kantor camat.

Regulator system berfungsi untuk menyalurkan gas alam ke setiap pipa yang sudah di tanam sebelum didistribusikan kepada konsumen. Dalam regulator system yang di dalamnya terdapat kompresor akan dimasukkan tekanan gas alam sebesar 2 bar dan akan diperkecil lagi saat didistribusikan ke rumah konsumen sebesar 0,0 bar. Sehingga gas alam yang dinikmati konsumen tidak berbahaya saat digunakan.

Dan pada tahun 2018 masyarakat kecamatan Sail sudah dapat menikmati jaringan gas rumah tangga, dan hingga saat ini jumlah sambungan jaringan gas di kecamatan Sail yaitu sebanyak 1.770 sambungan rumah. Ada banyak keuntungan menggunakan gas rumah tangga ini.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden Penelitian

Identitas responden berguna untuk mengetahui banyak responden, jenis kelamin usia dan pendidikan, hal ini penting untuk menggambarkan bagaimana kondisi responden yang terdapat dalam penelitian ini sehingga dapat lebih

memperjelas mengenai hasil penelitian. Untuk jelasnya identitas responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. V.1. Distribusi Jenis Kelamin Responden Penelitian

No	Jenis Kelamin	Populasi	Persentase
1.	Laki – laki	45	44%
2.	Perempuan	59	56%
Jumlah		104	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.1 di atas terlihat bahwa dalam penelitian ini responden penelitian yang terdiri dari pegawai, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang menggunakan jaringan gas rumah tangga di Kecamatan Sail didominasi oleh jenis kelamin perempuan yaitu dengan jumlah 59 responden atau 56%. Sedangkan jumlah responden yang paling kecil menurut jenis kelamin adalah laki-laki dengan jumlah 45 responden atau 44%. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan pembagian responden berdasarkan umur. Berikut mengenai informasi pengelompokan umur dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.2. Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Umur

No	Umur	Responden	Persentase
1.	≤ 30 Tahun	10	10%
2.	30-39 Tahun	29	25%
3.	40-49 Tahun	40	38%
4.	≥50 Tahun	25	27%
Jumlah		104	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Berdasarkan tabel V.2 di atas, terlihat bahwa responden penelitian pada tingkat umur terbanyak adalah pada umur 40-49 tahun yaitu sebanyak 40 responden atau 38%. Sedangkan responden penelitian berdasarkan umur yang paling sedikit jumlahnya yaitu umur ≥ 30 Tahun yaitu dengan jumlah 10 responden atau 10%. Selanjutnya peneliti akan menjelaskan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, agar dapat menggambarkan bagaimana keadaan responden penelitian pada tingkat pendidikannya, maka berikut adalah tabel distribusi responden berdasarkan tingkat pendidikan:

Tabel V.3. Distribusi Jumlah Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Responden	Persentase
1.	SD	4	3%
2.	SMP	21	18%
3.	SMA/Sederajat	58	62%
4.	Diploma	7	6%
5.	Sarjana	14	11%
Jumlah		104	100%

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.3 diatas terlihat bahwa pada responden penelitian didominasi oleh tingkat SMA/Sederajat yaitu berjumlah 58 Responden atau 62%. Sedangkan jumlah responden terkecil berdasarkan tingkat pendidikannya itu terdapat pada pendidikan Diploma yaitu berjumlah 7 responden atau 6%. Setelah menggambarkan dan menjelaskan kondisi responden melalui identitas jenis kelamin, umur dan tingkatan pendidikan selanjutnya akan dilakukan pembahasan mengenai hasil

penelitian tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru.

B. Hasil dan Pembahasan

Pada sub bab hasil dan pembahasan ini akan dilakukan pemaparan hasil penelitian dan akan dilakukan juga pembahasan dari tanggapan responden penelitian yang terdiri dari koordinator energi gas di dinas energi sumber daya mineral kota Pekanbaru, koordinator jaringan gas di PT. Sarana Pembangunan Energi Madani kota Pekanbaru, kepala camat kecamatan Sail, ketua Rw dan masyarakat yang menggunakan jaringan gas rumah tangga. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil dan pembahasan penelitian dapat dilihat sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan ukuran dan tujuan dari suatu kebijakan atau program dalam jangka tertentu, tentunya dalam suatu kebijakan atau program adanya tujuan yang harus dicapai karena standard an sasaran merupakan rencana dan rancangan awal kegiatan tersebut dibuat sehingga harus memiliki tujuan dan ukuran yang jelas agar dapat diukur tingkat keberhasilannya. Setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada responden penelitian dan pengelolaan data maka untuk indicator standard an sasaran kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.4 Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Standar dan Sasaran Kebijakan Untuk Pegawai

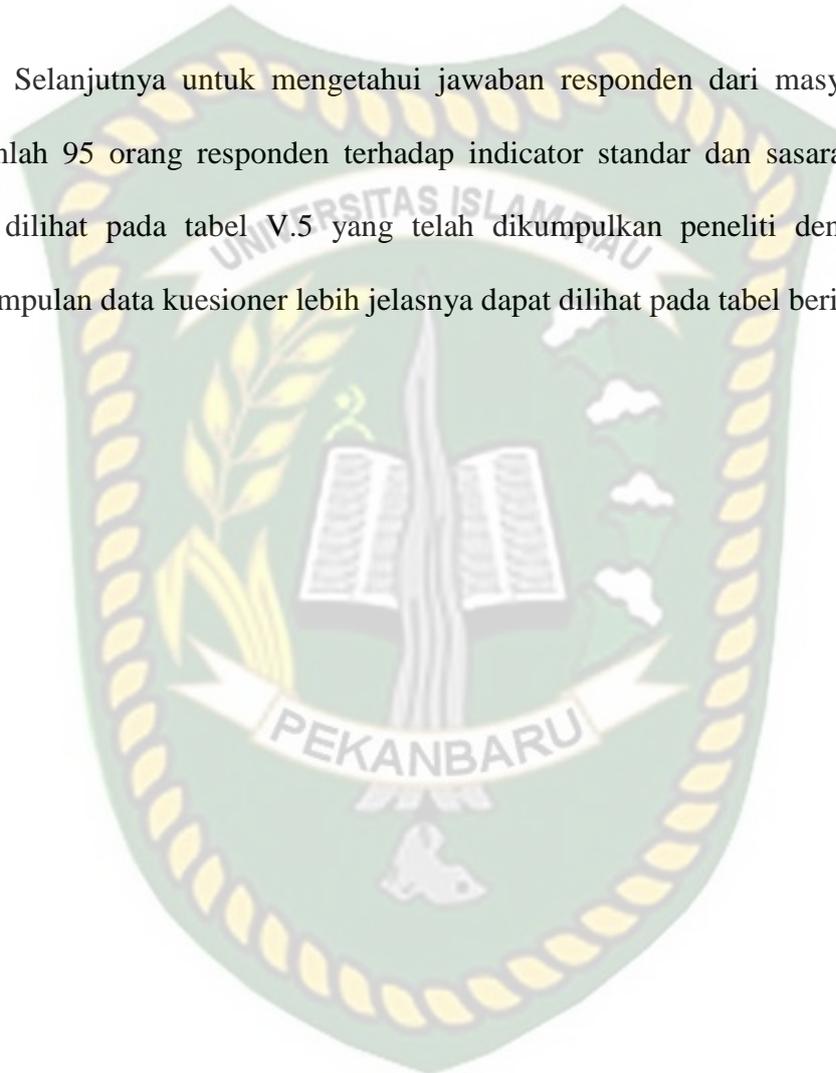
No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Standar kebijakan program jaringan gas rumah tangga	3	5	1	9
2.	Sasaran kebijakan program jaringan gas rumah tangga	4	5	-	9
Jumlah		7	10	1	18
Skor		21	20	1	42
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olaharan Peneliti, 2020

Dari penjelasan tabel di atas dapat dilihat tanggapan responden pegawai ,mengenai Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru, pada indikator Standar dan Sasaran Kebijakan. Responden yang menjawab terlaksana sebanyak 7 orang atau berada pada skor 21, adapun kesimpulan dari responden menjawab terlaksana karena mereka merasa bahwa program jaringan gas rumah tangga ini telah dilaksanakan sesuai dengan standar kebijakan yang ada. Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 10 orang atau berada pada skor 20, adapun alasan responden tersebut ialah mereka merasa bahwa tujuan atau sasaran dalam program jaringan gas rumah tangga ini sudah cukup tercapai. Sementara itu yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 1 orang atau pada skor 1, alasan responden mengatakan kurang terlaksana karena ia merasa bahwa program ini masih kurang terlaksana dalam pencapaian

tujuannya. Dari tabel responden pegawai tersebut dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Program Jaringan Gas Rumah Tangga pada indikator standar dan sasaran kebijakan terdapat pada kategori Cukup Terlaksana dengan jumlah total skor 42.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden dari masyarakat yang berjumlah 95 orang responden terhadap indicator standar dan sasaran kebijakan dapat dilihat pada tabel V.5 yang telah dikumpulkan peneliti dengan metode pengumpulan data kuesioner lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel V.5 Distribusi Jawaban Responden Penelitian Standard dan Sasaran Kebijakan Untuk Masyarakat

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Standar	25	65	5	95

	kebijakan program jaringan gas rumah tangga				
2.	Sasaran kebijakan program jaringan gas rumah tangga	20	70	5	95
	Jumlah	45	135	10	190
	Skor	135	270	10	415
	Kategori	Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari penjelasan tabel di atas dapat dilihat tanggapan responden masyarakat ,mengenai Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru, pada indikator Standar dan Sasaran Kebijakan. Responden yang menjawab terlaksana sebanyak 45 orang atau berada pada skor 135, adapun kesimpulan dari responden menjawab terlaksana karena sejauh ini masyarakat merasa bahwa program jaringan gas rumah tangga ini dapat memudahkan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari, terutama pada ibu rumah tangga yang tidak perlu kesulitan lagi untuk mencari gas LPG yang sekarang mulai sulit untuk ditemukan. Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 135 orang atau berada pada skor 270, adapun alasan responden tersebut ialah dengan adanya program ini masyarakat merasa cukup terbantu dari segi ekonomi. Sementara itu yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 10 orang atau pada skor 10, alasan responden mengatakan kurang terlaksana karena masih ada masyarakat yang merasa bahwa program tersebut belum tepat sasaran, karena

masih ada beberapa masyarakat yang tidak bisa menikmati program tersebut. Dari tabel responden pegawai tersebut dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Program Jaringan Gas Rumah Tangga pada indikator standar dan sasaran kebijakan terdapat pada kategori Cukup Terlaksana dengan jumlah total skor 415.

Informasi selanjutnya didapatkan melalui wawancara dengan Kepala Bidang Energi di Dinas ESDM mengenai standard dan sasaran kebijakan, sebagai berikut:

“Pelaksanaan program pembangunan jaringan gas di kota pekanbaru belum dapat terlaksana secara keseluruhan, karena belum seluruh daerah di kota Pekanbaru dapat merasakan jaringan gas rumah tangga, penyebabnya karena dalam pembangunan memerlukan dana yang cukup besar, dan daerah yang paling diutamakan itu adalah daerah yang dekat dengan sumber gas, sehingga pada saat ini pembangunan masih tetap terus dilakukan, dan program ini pun akan dibangun secara berkelanjutan. Dan mengenai sasaran, kebijakan ini telah tepat sasaran, dapat dikatakan demikian karena pada tahap pertama dan kedua seluruh masyarakat dapat menggunakan jaringan gas ini, dan untuk tahap pembangunan saat ini diutamakan kepada masyarakat yang menengah kebawah”(**wawancara dengan Kepala Bidang Energi di Dinas ESDM, selasa 28 Juli**)

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan mengenai indikator standar dan sasaran kebijakan, peneliti melihat bahwa program jaringan gas rumah tangga ini sudah cukup tercapai tujuan, dimana masyarakat kecamatan Sail sudah banyak yang merasakan keunggulan dalam program ini, dengan adanya program ini lebih meringankan perekonomian masyarakat seperti lebih menghemat biaya pengeluaran, walaupun ada juga sebagian masyarakat yang merasa bahwa biaya pen Da untuk sarannya menurut hasil observasi peneliti juga sudah cukup

tercapai, dimana masyarakat menengah kebawah sudah dapat menikmati program tersebut. Tetapi alangkah lebih baiknya jika pelaksana kebijakan lebih memperhatikan lagi untuk standard an sasaran yang akan dicapai agar program tersebut dapat lebih baik lagi tingkat keberhasilannya.

Dari uraian data tabel dan hasil wawancara serta hasil pengamatan di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa jawaban responden pegawai dengan masyarakat terhadap indikator standar dan sasaran kebijakan sama yaitu cukup terlaksana. Hal ini dibuktikan dari hasil jawaban responden pegawai dan masyarakat yang mengatakan cukup terlaksana, karena responden merasa bahwa program jaringan gas rumah tangga ini cukup terlaksana sesuai dengan standar kebijakan yang ada dan sudah cukup tercapai sarannya bagi masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah dukungan yang diberikan pemerintah berupa dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan, sumber daya merupakan apa yang dimiliki oleh organisasi khususnya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan dan kegiatan, jika sumber daya tidak dapat disediakan maka suatu kegiatan yang direncanakan tidak akan bias berjalan karena tidak adanya dukungan seperti dana dan peralatan untuk melakukan pembangunan dan manusia untuk melaksanakan program serta waktu yang disediakan untuk pelaksanaan. setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada responden dan pengelola maka untuk indicator Sumber Daya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.6 Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Sumber Daya Untuk Pegawai

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	SDM yang ada pada program jaringan gas rumah tangga	8	1	-	9
2.	Fasilitas/peralatan yang diperlukan dalam pembagunan jaringan gas rumah tangga	5	4	-	9
Jumlah		13	5	-	18
Skor		39	10	-	49
Kategori		Terlaksana			

Sumber: Data Olaharan Peneliti, 2020

Dari tabel di atas diketahui tanggapan responden pegawai tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru, pada indikator sumber daya responden yang menjawab terlaksana sebanyak 13 orang atau berada pada skor 39, adapun kesimpulan dari alasan reponden menjawab terlaksana karena menurut responden untuk sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sudah terpenuhi. Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 5 orang atau pada skor 10, adapun alasan responden

yaitu karena dalam pemenuhan fasilitas atau peralatan untuk melakukan pembangunan sudah cukup terpenuhi, tetapi yang sering menjadi kendala pada kontraktor adalah kerusakan pada instalasi meteran. Kemudian responden yang menjawab kurang terlaksana yaitu 0. Dari tanggapan responden tersebut dapat dipahami bahwa dalam indikator sumber daya sudah terlaksana dengan pencapaian jumlah skor 49.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden dari masyarakat yang berjumlah 95 orang responden terhadap sumber daya dapat dilihat pada tabel V.7 yang telah dikumpulkan peneliti dengan metode pengumpulan data kuesioner lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.7 Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Sumber Daya Manusia Untuk Masyarakat

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	SDM yang ada pada program jaringan gas rumah tangga	17	28	50	95
2.	Fasilitas/peralatan yang diperlukan dalam pembagunan jaringan gas rumah tangga	10	26	59	95
Jumlah		17	54	109	18
Skor		51	108	109	268
Kategori		Kurang Terlaksana			

Sumber: Data Olaharan Peneliti, 2020

Dari tabel di atas diketahui tanggapan responden masyarakat tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru, pada indikator sumber daya responden yang menjawab terlaksana sebanyak 17 orang atau berada pada skor 51, adapun kesimpulan dari alasan responden menjawab terlaksana karena menurut masyarakat untuk sumber daya yang dimiliki oleh organisasi pemerintahan sudah terpenuhi. Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 54 orang atau pada skor 108, adapun alasan responden yaitu masyarakat bertanggung jawab bahwa pelaksanaan pembangunan jaringan gas telah cukup terlaksana, tetapi masyarakat merasa bahwa waktu dalam penyelesaian pembangunan masih belum sesuai dengan sasaran. Kemudian responden yang menjawab kurang terlaksana yaitu sebanyak 109 orang atau dengan skor 109. Alasan dari responden menjawab kurang terlaksana adalah dalam pembangunan masih sering terdapat pipa buntu dan meteran yang rusak, sehingga setelah dipasang pada rumah masyarakat belum dapat menggunakan langsung. Dari tanggapan responden tersebut dapat dikategorikan bahwa pada indikator sumber daya tidak terlaksana, terbukti pada jawaban responden yaitu berada pada skor 109.

Kemudian informasi yang yang didapatkan dari wawancara dengan Kepala Bidang Energi di Dinas ESDM mengenai sumber daya:

“Kalau untuk SDM menurut saya sejauh ini sudah cukup terpenuhi, kemudian untuk peralatan atau fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan juga sudah cukup terpenuhi, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilaksanakan dengan

baik” ”(wawancara dengan Kepala Bidang Energi di Dinas ESDM, selasa 28 Juli)

Kemudian dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, memang SDM pada Program jaringan gas rumah tangga di Kota Pekanbaru khususnya di daerah Kecamatan Sail, ada beberapa terdapat rumah yang meteran gas nya rusak, sehingga masyarakat tidak lagi menggunakan jaringan gas tersebut, dan ada juga masyarakat yang mengeluh karena tekanan gas yang terdapat di rumahnya sangat kecil, dan dari waktu penyelesaian juga cukup lama.

Dari uraian tabel dan wawancara serta hasil pengamatan di lapangan dapat ditarik kesimpulan terhadap indikator sumber daya, terdapat jawaban yang berbeda antara pegawai dengan masyarakat, dimana pegawai menjawab cukup terlaksana, dengan berpendapat bahwa sumber daya dan fasilitas dalam pembangunna jaringan gas sudah cukup terlaksana. Sedangkan masyarakat menjawab kurang terlaksana, dimana masyarakat menjawab kurang terlaksana karena ada kendala yg ditemukan oleh masyarakat terhadap fasilitas atau peralatan, seperti meteran yang eror dan pipa yang buntu, dan masyarakat juga merasa bahwa waktu dalam penyelesaian pembangunan cukup lama.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi mekanisme prosedur yang direncanakan untuuk melaksanakan kebijakan yang telah disusun dengan cara menyebarkan informasi. Komunikasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau program dapat berupa sosialisasi serta penyebaran informasi lain yang bersangkutan dengan

program tersebut. Setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada responden penelitian dapat dan pengelolah data, maka untuk indicator komunikasi antar organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.8 Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Komunikasi Antar Organisasi Untuk Pegawai

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Hubungan pelaksana dengan penerima dalam program jaringan gas rumah tangga	2	4	3	9
2.	Pemberian informasi kepada masyarakat (sosialisasi)	3	3	3	9
Jumlah		5	7	6	18
Skor		15	14	6	35
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden pegawai, tanggapan responden yang menjawab terlaksana sebanyak 5 orang atau pada skor 15, adapun alasan responden menjawab terlaksana yaitu responden merasa bahwa komunikasi antar organisasi telah dilaksanakan. Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 7 orang atau pada skor 14, adapun alasannya yaitu sebelum melakukan pembangunan pemerintah terlebih dahulu telah cukup memberikan informasi kepada masyarakat dengan cara mendata masyarakat. Kemudian

responden yang menjawab kurang terlaksana yaitu sebanyak 6 orang atau pada skor 6, alasannya adalah responden merasa kurangnya dana atau jangkauan untuk melakukan sosialisasi yang baik dengan masyarakat, sehingga sosialisasi sejauh ini dilakukan secukupnya saja. Dari tabel responden pegawai tersebut dapat dilihat bahwa indikator komunikasi antar organisasi terdapat pada kategori cukup terlaksana dengan jumlah skor 35.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden dari masyarakat yang berjumlah 95 orang responden terhadap komunikasi antar organisasi dapat dilihat pada tabel V.9 yang telah dikumpulkan peneliti dengan metode pengumpulan data kuesioner, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.9 Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Komunikasi Antar Organisasi Untuk Masyarakat

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Hubungan pelaksana dengan penerima dalam program jaringan gas rumah tangga	15	22	58	95
2.	Pemberian informasi kepada masyarakat (sosialisasi)	13	18	64	95
Jumlah		28	40	122	190
Skor		84	80	122	286
Kategori		Kurang Terlaksana			

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden masyarakat, tanggapan responden yang menjawab terlaksana sebanyak 28 orang atau pada skor 84, adapun alasan responden menjawab terlaksana yaitu masyarakat merasa bahwa organisasi telah menjalin komunikasi yang baik atau menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat memahami. Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 40 orang atau pada skor 80, adapun alasannya yaitu masyarakat merasa bahwa pendataan dan pemberian informasi sudah cukup terlaksana, tetapi masyarakat berharap untuk sosialisasi agar lebih dapat dilakukan secara menyeluruh lagi. Kemudian responden yang menjawab kurang terlaksana yaitu sebanyak 122 orang atau pada skor 122, alasannya adalah masih terdapat masyarakat yang ragu untuk menggunakan jaringan gas tersebut, penyebabnya adalah kurangnya informasi mengenai pencegahan kebocoran yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga masyarakat masih ragu atau takut untuk menggunakan jaringan gas tersebut. Dari tabel responden masyarakat tersebut dapat dilihat bahwa indikator komunikasi antar organisasi terdapat pada kategori kurang terlaksana dengan jumlah skor 286.

Informasi selanjutnya yang didapatkan melalui wawancara dengan Kepala Bidang Energi di Dinas ESDM, mengenai komunikasi antar organisasi sebagai berikut:

“Kami disini sebagai pelaksana kebijakan dan kemudian tugas tersebut saya turunkan kepada BUND yaitu PT SPEM, telah menjalankan komunikasi yang cukup baik antar organisasi dalam hal pembangunan program jaringan gas rumah tangga ini, sehingga pelaksanaan mengenai sosialisasi atau komunikasi dengan masyarakat itu sudah dilakukan dengan sebaik mungkin, sehingga pendataan pun

dapat dilakukan. Dan mengenai sosialisasi sejauh ini sudah dilakukan cukup baik, sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi seperti keamanan, keunggulan, dan informasi pencegahan kebocoran.”(wawancara dengan Kepala Bidang Energi di Dinas ESDM, selasa 28 Juli)

Kemudian dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, masyarakat cenderung ragu untuk beralih menggunakan jaringan gas tersebut karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai program jaringan gas tersebut seperti keuntungan, keamanan dan pencegahan kebocoran. Masyarakat takut jika terjadinya kebocoran, dan ketakutan mereka semakin besar karena pipa jaringan gas tersebut sangat dekat dengan lingkungan mereka. Sosialisasi memang sangat berpengaruh besar terhadap suatu program, sehingga seharusnya sosialisasi dapat dilakukan lebih baik lebih menyeluruh lagi.

Dari uraian data tabel dan hasil wawancara serta hasil pengamatan di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa jawaban responden pegawai dengan masyarakat pada indikator komunikasi antar organisasi berbeda, dimana jawaban responden pegawai berada pada kategori cukup terlaksana yaitu. Sedangkan jawaban responden masyarakat berada pada kategori kurang terlaksana. Karena responden masyarakat merasa bahwa sosialisasi yang dilakukan masih kurang, sehingga masih terdapat masyarakat yang ragu untuk beralih menggunakan jaringan gas tersebut. Dan masyarakat juga berharap agar sosialisasi dapat dilakukan dengan lebih baik lagi, agar masyarakat memahami mengenai pencegahan atau keuntungan dari program jaringan gas rumah tangga tersebut.

4.Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana merupakan Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan. Setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada responden penelitian pada tabel dibawah ini:

Tabel V.10 Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Karakteristik Agen Pelaksana Untuk Pegawai

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Karakteristik agen pelaksana kebijakan program jaringan gas rumah tangga	4	4	1	9
2.	Bekerja sesuai dengan SOP	5	3	1	9
Jumlah		9	7	2	18
Skor		27	14	2	43
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olaharan Peneliti, 2020

Dari tabel di atas diketahui tanggapan responden pegawai tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru, pada indikator Karakteristik agen pelaksana responden yang menjawab terlaksana sebanyak 9 orang atau berada pada skor 27, adapun kesimpulan dari alasan reponden menjawab terlaksana karena menurut responden untuk para agen pelaksana kebijakan sudah sesuai dengan kemampuan yang diperlukan dalam melakukan kebijakan. Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 7 orang atau pada skor 14, adapun alasan responden yaitu karena para pelaksana kebijakan telah cukup terlaksana dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan SOP yang ada seperti meminta izin terlebih dahulu ketika melaukan pembobolan dan penggalian di pinggir jalan. Kemudian responden yang menjawab kurang terlaksana yaitu 2 orang atau jumlah skor 2, alasan dari responden karena kurangnya dukungan dari kelompok-kelompok penting bagi pelaksana. Dari tanggapan responden pegawai tersebut berada pada kategori cukup terlaksanaan yang berada pada skor 43.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden dari masyarakat yang berjumlah 95 orang responden terhadap Karakteristik Agen Pelaksana dapat dilihat pada tabel V.11 yang telah dikumpulkan peneliti dengan metode pengumpulan data kuesioner, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.11 Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Krakteristik Agen Pelaksana Untuk Masyarakat

No		Pengukuran Indikator	
----	--	----------------------	--

	Item Penilaian	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1.	Karakteristik agen pelaksana kebijakan program jaringan gas rumah tangga	18	64	13	95
2.	Bekerja sesuai dengan SOP	33	45	17	95
Jumlah		51	109	30	190
Skor		153	218	30	401
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olaharan Peneliti, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden masyarakat, tanggapan responden yang menjawab terlaksana sebanyak 51 orang atau pada skor 153, adapun alasan responden menjawab terlaksana yaitu responden merasa bahwa pelaksana kebijakan program sudah sesuai dengan kebutuhan program, seperti para teknisi yang sudah paham mengenai jaringan gas. Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 109 orang atau pada skor 218, adapun alasannya yaitu masyarakat merasa bahwa pelaksana kebijakan sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya, seperti jika ada kerusakan atau kendala yg dialami, masyarakat hanya perlu menghubungi teknisi, tetapi ada juga beberapa masyarakat yang merasa terbebani, dimana ada beberapa teknisi yang memimta bayaran disaat melakukan perbaikan. Kemudian responden yang menjawab kurang terlaksana yaitu sebanyak 30 orang atau pada skor 30, alasannya adalah responden beranggapan bahwa pelaksana pembangjnan kurang tanggung jawab dalam

melakukan tugasnya, karena disaat melakukan pembobolan teknisi tidak menempel kembali hasil bobolan tersebut. Dari tabel responden masyarakat tersebut dapat dilihat bahwa indikator Karakteristik agen pelaksana terdapat pada kategori cukup terlaksana dengan jumlah skor 401.

Informasi selanjutnya yang di dapatkan dari Kepala Bidang Energi di Dinas ESDM mengenai karakteristik agen pelaksana sebagai berikut:

“Respon kami terhadap program ini sangat membantu masyarakat, karena dapat memperingankan perekonomian masyarakat, karena harganya lebih murah, dan lebih mempermudah masyarakat dalam mencari gas. Dan untuk sikap pelaksana diharuskan lebih memperhatikan keadaan di lapangan dan yang menjadi hambatan pelaksana”. **(wawancara dengan Kepala Bidang Energi di Dinas ESDM, selasa 28 Juli)**

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan untuk indicator Karakteristik agen pelaksana dalam pelaksanaan program jaringan gas rumah tangga di kota Pekanbaru, dalam hal ini peneliti dapat penialain cukup terlaksana. Karena terdapat beberapa alasan dari responden penelitian dari masyarakat yang menggunakan jaringan gas rumah tangga, antara lain yaitu mengenai karakteristik pelaksana pembangunan jaringan gas rumah tangga atau yang biasa disebut teknisi, banyak masyarakat yang bertanggung bahwa teknisi telah melakukan tugasnya dengan cukup baik, seperti jika ada kerusakan masyarakat menghubungi ke kantor dan kemudian teknisi akan datang ke rumah tersebut. Tetapi ada juga masyarakat merasa bahwa sikap pelaksana pembangunan kurang baik, alasannya karena teknisi sering meminta bayaran yang berlebihan ketika sedang melakukan perbaikan, dan teknisi juga sering sekali mencopot meteran tanpa sepengetahuan pemilik rumah.

Dari uraian data tabel dan hasil wawancara serta hasil pengamatan di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa jawaban responden pegawai dengan masyarakat pada indikator komunikasi antar organisasi sama yaitu cukup terlaksana. Hal ini dibuktikan dari hasil jawaban responden pegawai dan masyarakat yang mengatakan cukup terlaksana, karena pelaksana kebijakan sudah memiliki kriteria yang pas untuk melaksanakan kebijakan dan pelaksana juga sudah cukup melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang ada, dan para teknisi juga harus lebih memperhatikan keluhan-keluhan dari masyarakat.

5. Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan adalah dimana suatu kebijakan akan dijalankan meliputi lingkungan ekonomi, social dan politik. Indikator ini dimaksudkan adakah pengaruh suatu kebijakan ini terhadap lingkungan masyarakat, seperti dalam perekonomian, dan pengetahuan tentang politik atau pemerintahan. Setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada responden penelitian dan pengolahan data maka untuk lingkungan ekonomi, social dan politik dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V.12 Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Untuk Pegawai

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Pengaruh positif di lingkungan sekitar	2	5	2	9

2.	Pengaruh negative di lingkungan sekitar	2	5	2	9
Jumlah		4	10	4	18
Skor		12	20	4	36
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olaharan Peneliti, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden pegawai, tanggapan responden yang menjawab terlaksana sebanyak 4 orang atau pada skor 12, adapun alasan responden menjawab terlaksana yaitu bahwa program jaringan gas tersebut terdapat pengaruh positif dalam pelaksanaan pembangunannya seperti keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat. Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 10 orang atau pada skor 20, adapun alasannya yaitu dengan adanya program jaringan gas rumah tangga tersebut juga menambah pengetahuan masyarakat mengenai politik atau upaya pemerintahan saat ini, akan tetapi para pelaksanaan kebijakan harus lebih baik lagi dalam menjalankan komunikasi dengan masyarakat. Kemudian responden yang menjawab kurang terlaksana yaitu sebanyak 4 orang atau pada skor 4, alasannya adalah responden juga menemukan beberapa keluhan dari masyarakat terhadap pembangunan seperti keluhan kerusakan jalan.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden dari masyarakat yang berjumlah 95 orang responden terhadap Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik dapat dilihat pada tabel V.13 yang telah dikumpulkan peneliti dengan metode pengumpulan data kuesioner, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.13 Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik Untuk Masyarakat

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Pengaruh positif di lingkungan sekitar	17	49	29	95
2.	Pengaruh negative di lingkungan sekitar	36	48	11	95
Jumlah		53	97	30	190
Skor		159	194	30	383
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olaharan Peneliti, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden masyarakat, tanggapan responden yang menjawab terlaksana sebanyak 53 orang atau pada skor 159 adapun alasan responden menjawab terlaksana yaitu dengan adanya program jaringan gas tersebut sangat berpengaruh positif pada lingkungan sekitar, seperti dari segi ekonomi. Dan untuk pengaruh negative responden juga merasakan dampaknya seperti kerusakan jalan Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 97 orang atau pada skor 194, adapun alasannya yaitu responden merasa bahwa program jaringan gas tersebut cukup berpengaruh positif di lingkungan sekitar yang lebih ramah lingkungan. Kemudian responden yang menjawab kurang terlaksana yaitu sebanyak 30 orang atau pada skor 30, alasannya

adalah responden beranggapan bahwa biaya dalam menggunakan jaringan gas dengan menggunakan gas LPG sama saja, sehingga responden tidak merasakan pengaruh apa-apa. Dari tabel responden masyarakat tersebut dapat dilihat bahwa indikator Karakteristik agen pelaksana terdapat pada kategori cukup terlaksana dengan jumlah skor 383.

Berdasarkan penelitian dilapangan untuk indicator Lingkungan ekonomi, social dan politik dalam pelaksanaan program jaringan gas rumah tangga di kota Pekanbaru, dalam hal ini peneliti dapat penialain cukup terlaksana. Karena terdapat beberapa alasan dari responden penelitian dari masyarakat yang menggunakan jaringan gas rumah tangga, dan terdapat pengaruh dalam lingkungan sekitar, seperti berpengaruh terhadap ekonomi masyarakat, yang masyarakat lebih mengetahui mengenai pemerintahan atau program yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat. Dengan adanya program ini masyarakat merasa terbantu dengan perekonomian, karena masyarakat merasa lebih ringan pengeluaran dengan menggunakan jaringan gas rumah tangga dibandingkan dengan gas LPG.

Dan untuk pengaruh negative banyak masyarakat yang merasa bahwa pembangunan menimbulkan kerusakan di sekitar rumah masyarakat, seperti penggalian yang tidak ditimbun kembali dengan rata, dan untuk rumah masyarakat ketika pelaksana pembangunan menyambungkan pipa ke rumah masyarakat, teknisi harus membobol atau memberi lubang di tembok masyarakat, dan ada sebagian teknisi yang tidak menempelnya kembali.

Informasi yang didapatkan melalui wawancara dengan Kepala Bidang Energi di Dinas ESDM, adalah sebagai berikut:

“Dengan adanya program ini, sudah sangat membantu kebutuhan masyarakat saat ini, dan sudah dapat membantu perekonomian atau meringankan perekonomian masyarakat saat ini, terutama lagi bagi masyarakat menengah ke atas. Dan untuk pengaruh negative di lingkungan sekitar, itu biasa terjadi pada saat pembangunan, tetapi pelaksana pembangunan juga sudah diberi arahan untuk menimbun kembali lubang atau memperbaiki kembali apa yg sudah di rusak, ya walalupun memang tidak akan bias sempurna seperti awal” (**wawancara dengan Kepala Bidang Energi di Dinas ESDM, selasa 28 Juli**)

Dari uraian data tabel dan hasil wawancara serta hasil pengamatan di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa program jaringan gas rumah tangga ini dapat mempengaruhi kondisi ekonomi di lingkungan masyarakat, dan diketahui juga lebih ramah terhadap lingkungan sekitar. Dimana masyarakat juga merasa tidak sulit lagi untuk mencari gas, terlebih dimasa saat ini gas LPG yang sudah mulai langka, dan harganya pun relative lebih mahal. Dan untuk pengaruh negative di lingkungan juga masih dirasakan oleh masyarakat, seperti kerusakan jalan akibat penggalian lubang yang tidak ditimbun kembali dengan baik, sehingga jalan berlubang dan mengganggu aktivitas berjalan masyarakat.

6. Disposisi Implementor

Disposisi implementor merupakan sikap pelaksana, sikap tersebut meliputi sanasikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil

formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Setelah melakukan penyebaran kuesioner kepada responden penelitian dapat dan pengolahan data maka untuk indicator agen pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.14 Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Disposisi Implementor Untuk Pegawai

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Respon implementor terhadap kebijakan	3	2	4	9
2.	Pemahaman implmentor terhadap kebijakan	2	4	3	9
Jumlah		5	6	7	18
Skor		15	12	7	34
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olaharan Peneliti, 2020

Dari tabel di atas diketahui tanggapan responden pegawai tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru, pada indikator disposisi implementor responden yang menjawab terlaksana sebanyak 5 orang atau berada pada skor 15, adapun kesimpulan dari alasan reponden menjawab terlaksana karena menurut responden implementor telah merespon kebijakan dengan cara menerima kebijakan dan melaksanakan kebijakan.

Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 6 orang atau pada skor 12, adapun alasan responden yaitu karena implementor sudah cukup memahami kebijakan, dengan memahami kebijakan, pelaksanaan pun dapat dilakukan dengan efektif. Kemudian responden yang menjawab kurang terlaksana yaitu 7 orang atau jumlah skor 7, alasan dari responden karena masih adanya sikap penolakan dari implementor terhadap kebijakan. Dari tanggapan responden pegawai tersebut berada pada kategori cukup terlaksana yang berada pada skor 34.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban responden dari masyarakat yang berjumlah 95 orang responden terhadap Disposisi Implementor dapat dilihat pada tabel V.15 yang telah dikumpulkan peneliti dengan metode pengumpulan data kuesioner, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.15 Distribusi Jawaban Responden Penelitian Tentang Disposisi Implementor Untuk Masyarakat

No	Item Penilaian	Pengukuran Indikator			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Respon implementor terhadap kebijakan	28	48	19	95
2.	Pemahaman implmentor terhadap kebijakan	33	43	19	95
Jumlah		61	91	38	190
Skor		183	182	38	403
Kategori		Cukup Terlaksana			

Sumber: Data Olaharan Peneliti, 2020

Dari tabel di atas dapat diketahui tanggapan responden masyarakat, tanggapan responden yang menjawab terlaksana sebanyak 61 orang atau pada skor 183 adapun alasan responden menjawab terlaksana yaitu responden merasa bahwa implementor atau pelaksana kebijakan telah paham terhadap kebijakan program. Selanjutnya responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 91 orang atau pada skor 182, adapun alasannya yaitu responden merasa bahwa implementor telah cukup baik merespon kebijakan yang diberikan sehingga dapat cukup baik dalam melaksanakan kebijakan. Kemudian responden yang menjawab kurang terlaksana yaitu sebanyak 38 orang atau pada skor 38, alasannya adalah responden merasa bahwa dalam melaksanakan pembangunan ada responden yang tidak dapat menikmati jaringan gas rumah tangga dengan baik karena mengalami kerusakan. Dari tabel responden masyarakat tersebut dapat dilihat bahwa indikator Karakteristik agen pelaksana terdapat pada kategori cukup terlaksana dengan jumlah skor 403.

Informasi selanjutnya yang didapatkan dari Kepala Bidang Energi di Dinas ESDM, mengenai disposisi implementor sebagai berikut:

“Dalam melakukan pembangunan program jaringan gas rumah tangga ini, sudah sangat memilih organisasi yang tepat untuk melakukannya, karena dalam melakukan pembangunan dilakukan juga pengawasan, sehingga harapan kami setelah pembangunan selesai tidak ada lagi kerusakan atau masalah yang ditemukan oleh masyarakat, dan sehingga masyarakat dapat menikmati program ini dengan baik” (wawancara dengan Kepala Bidang Energi di Dinas ESDM, selasa 28 Juli)

Berdasarkan penelitian dilapangan untuk indicator Disposisi Implementor dalam pelaksanaan program jaringan gas rumah tangga di kota Pekanbaru, dalam hal ini peneliti dapat penialain cukup terlaksana. Karena terdapat beberapa alasan dari respponden penelitian yaiutu masyarakat yang menggunakan jaringan gas rumah tangga. Menurut masyarakat respon pelaksana kebijakan sudahh cukup baik, karena pelaksana dapat merespon dengan cepat dan memberikan informasi kepada masyarakat. Untuk pemahaman pelaksana kebijakan juga masyarakat sudah merasa cukup terlaksana, tetapi ada juga sebagian masyarakat yang kurang puas dengan kerja pelaksana, karena ketika selesai pembangunan program, ada beberapa masyarakat yang mengalami kendala, seperti gasnya tidak menyala, apinya terlalu kecil, dan lain sebagainya.

Dari uraian data tabel dan hasil wawancara serta hasil pengamatan di lapangan, dapat ditarik kesimpulan bahwa program jaringan gas rumah tangga pada indikator disposisi implementor, jawaban responden pegawai dan masyarakat sama yaitu terletak pada kategori cukup terlaksana, dimana responden merasa bahwa respon implementor terhadap kebijakan dan pemahaman inplementor terhadap kebijakan sudah cukup baik, dan hanya perlu meningkatkan lagi agar pelaksana pembangunan program dapat lebih baik lagi.

C. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru

Setelah melakukan pembahasan masing-masing indicator maka untuk melihat hasil penelitian secara keseluruhan perlu dilakukan rekapitulasi seluruh

tanggapan responden penelitian mengenai Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru, meliputi 6 (enam) indikator penelitian, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.16 Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru Untuk Pegawai

No	Indikator	Jawaban Responden			Skor	Kategori
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana		
1.	Standard dan Sasaran Kebijakan	21	20	1	42	Cukup Terlaksana
2.	Sumber Daya	39	10	-	49	Terlaksana
3.	Komunikasi Antar Organisasi	15	14	6	35	Cukup Terlaksana
4.	Karakteristik Agen Pelaksana	27	14	2	18	Cukup Terlaksana
5.	Kondisi Lingkungan Ekonomi Sosial, dan Politik	12	20	4	36	Cukup Terlaksana
6.	Disposisi Impementor	15	12	7	34	Cukup Terlaksana
Jumlah Skor		214				
Kategori		Cukup Terlaksana				

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2020

Dari tabel V.16 di atas dapat diketahui hasil rekapitulasi jawaban responden pegawai dalam penelitian tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan dari keseluruhan skor yang berjumlah 214 pada rentan skor 181-252 pada kategori **Cukup Terlaksana** yang berdasarkan jawaban responden pegawai dari hasil penyebaran kuesioner. Akan tetapi dalam hal ini menurut penulis masih banyak yang harus diperhatikan oleh pelaksana pembangunan jaringan gas rumah tangga, agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Tabel V.17 Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian Tentang Pelaksanaan Program Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru Untuk Masyarakat

No	Indikator	Jawaban Responden			Skor	Kategori
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana		
1.	Standard dan Sasaran Kebijakan	135	270	10	413	Cukup Terlaksana
2.	Sumber Daya	51	108	109	268	Kurang Terlaksana
3.	Komunikasi Antar Organisasi	28	40	122	286	Kurang Terlaksana

4.	Karakteristik Agen Pelaksana	153	218	30	401	Cukup Terlaksana
5.	Kondisi Lingkungan Ekonomi Sosial, dan Politik	159	194	30	383	Cukup Terlaksana
6.	Disposisi Impementor	183	182	38	403	Cukup Terlaksana
Jumlah Skor		2.154				
Kategori		Cukup Terlaksana				

Sumber: Data Olaharan Peneliti, 2020

Dari tabel V.17 rekapitulasi hasil penilaian 6 indikator dari 95 responden masyarakat kecamatan sail yang menggunakan jaringan gas rumah tangga, yang masing-masing memiliki 3 item penilaian dalam penelitian Pelaksanaan Program Pemabngunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan dari keseluruhan skor yang berjumlah 2.154 pada rentan skor 1.901-2.660 pada kategori **Cukup Terlaksana** yang berdasarkan jawaban responden pegawai dari hasil penyebaran kuesioner.

Dari hasil pengumpulan data yang menggunakan teknik kuesioner, wawancara, observasi serta dokumentasi, Pelaksanaan Program Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru belum berjalan secara efektif atau dikategorikan cukup terlaksana. Dari 1.770 rumah tangga yang menggunakan jaringan gas rumah tangga di kecamatan Sail, masih banyak keluhan dari masyarakat mengenai kerusakan yang sering terjadi, seperti pipa buntu dan meteran yang rusak. Disini

terjadi kerusakan dikarenakan pelaksana pembangunan kurang teliti dalam melakukan pembangunan dan memperhatikan untuk peralatan yang digunakan seperti pipa dan meteran, sehingga sambungan pipa serig tidak sampai dan meteran sering basah terkena air. Dan kurangnya sosialisasi, banyak masyarakat yang masih ragu untuk beralih menggunakan jaringan gas rumah tangga tersebut, banyak keraguan yang dirasakan masyarakat seperti mengenai kebocoran dan cara penggunaannya. Disini pemerintah dan para pendamping sangat berperan penting dalam memberikan sosialisasi dan memberikan informasi mengenai penggunaan, keuntungan, keamaan dan pencegahan kebocoran, agar masyarakat tidak ragu atau menolak untuk menggunakan jaringan gas tersebut.

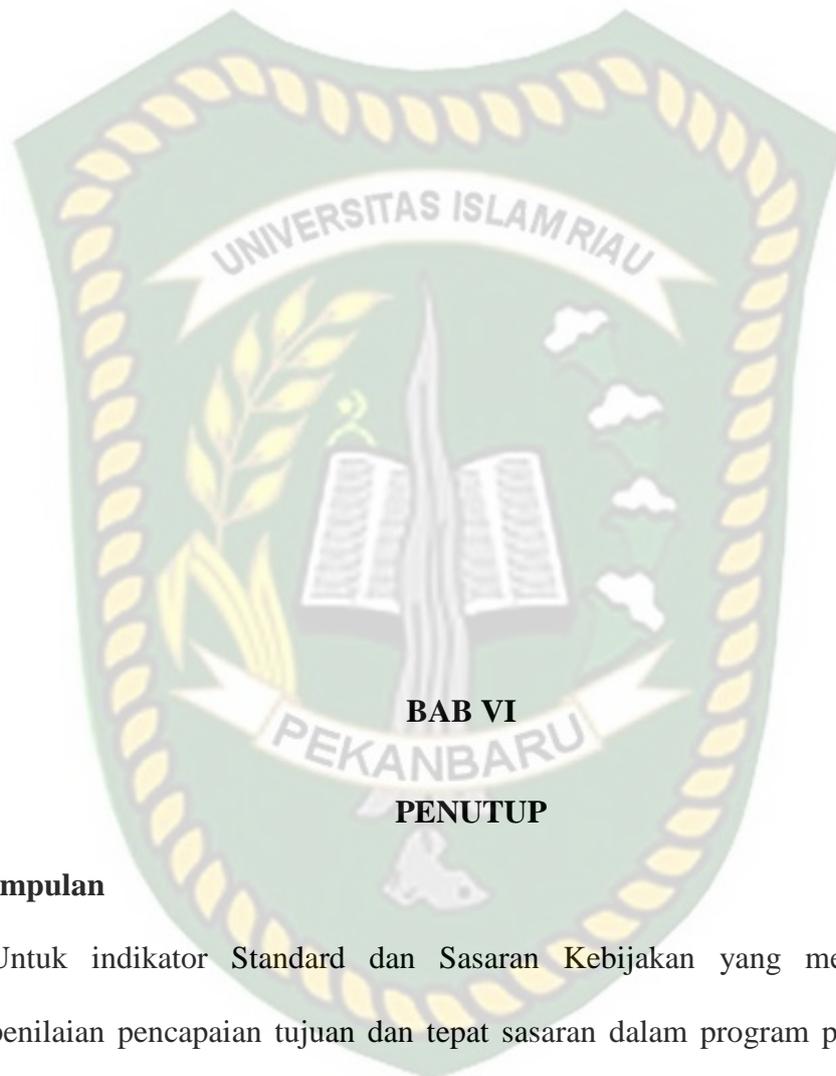
D. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program pembangunan jaringan gas rumah tangga di Kota Pekanbaru

Hambatan merupakan suatu rintangan ataupun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan. Hambatan ini bisa menjadi penyebab yang bisa mempengaruhi proses Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Gas Rumah Tangga di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini ada beberapa hambatan yang peneliti rangkum yaitu:

1. Hambatan untuk indikator sumber daya ialah fasilitas yang digunakan cenderung rusak, seperti meteran yang eror dan pipa yang kurang sehingga pipa buntu dan api yang dihasilkan pun semakin

kecil. Dan sering terjadi pungutan seperti ketika teknisi memperbaiki jaringan gas di rumah masyarakat ada juga teknisi yang meminta bayaran, padahal seharusnya dalam melakukan perbaikan tidak ada pungutan biaya.

2. Hambatan untuk indikator komunikasi yaitu kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga banyak penolakan dari masyarakat. Masyarakat menolak menggunakan jaringan gas tersebut dikarenakan masyarakat masih belum mengerti mengenai program tersebut, seperti tingkat keamanan dan keuntungan yang didapatkan. Dan masyarakat yang menggunakan pun masih ada yang kurang mengetahui bagaimana pencegahan jika terjadinya kebocoran.
3. Hambatan untuk indikator lingkungan adalah pengaruh negative dari pembangunan program tersebut, seperti kerusakan jalan dan pembobolan lubang pada rumah-rumah masyarakat. Dalam pembangunan tidak sedikit juga masyarakat yang merasa terganggu, terutama untuk masyarakat yang tinggal di pemukiman jalan yang kecil, dengan adanya pembangunan aktivitas berjalan masyarakat pun terganggu, dan tidak sedikit jalan juga yang menjadi rusak seperti berlubang akibat dari bekas penggalian yang tidak ditimbun lagi dengan baik.



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Untuk indikator Standard dan Sasaran Kebijakan yang memiliki item penilaian pencapaian tujuan dan tepat sasaran dalam program pembangunan jaringan gas rumah tangga, dari keseluruhan hasil yang diperoleh ialah cukup terlaksana. Dikarenakan untuk tujuan program jaringan gas rumah tangga masih belum tercapai secara efektif, karena program ini belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di kota pekanbaru, pelaksanaan pembangunannya pun masih berjalan cukup lama, dan masih banyak kerusakan dan masih banyak masyarakat yang menolak untu beralih menggunakan jaringan gas tersebut.

Dan untuk sasaran dalam program ini, sejauh ini sudah cukup terlaksana karena masyarakat yang diutamakan itu adalah masyarakat yang berpendapatan menengah ke bawah, dan sejauh ini sudah tepat. tetapi untuk pembangunan pada tahap 1 dan 2 itu seluruh masyarakat dapat menikmati program tersebut.

2. Untuk indikator Sumber Daya dengan item penilaian SDM yang ada pada program jaringan gas rumah tangga dan fasilitas/peralatan yang diperlukan dalam pembangunann jaringan gas rumah tangga, dari keseluruhan hasil yang diperoleh ialah cukup terlaksana. Dikarenakan SDM dan fasilitas atau perlatan yang diperlukan sudah terpenuhi sehingga pada pembangunan dapat dilakukan.
3. Untuk indikator Komunikasi antar Organisasi dengan item penilaian komunikasi yang dilakukan antara organisasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberian informasi mengenai pencegahan jika terjadinya kebocoran, dari keseluruhan hasil yang diperoleh ialah cukup terlaksana. Dikarenakan dalam melakukan sosialisasi masih kurang, sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai program ini dan sehingga masyarakat masih ragu untuk beralih menggunakan jaringan gas rumah tangga.
4. Untuk indikator Karakteristik Agen Pelaksana dengan item penilaian karakteristik implementor dan bekerja sesuaio dengan SOP, dari keseluruhan hasil yang diperoleh ialah cukup terlaksana. Bahwasanya pemerintah daerah sangat mendukung program ini dikarenakan bisa memudahkan masyarakat

dalam kehidupan sehari-hari seperti memasak. Dan para pendamping pun siap mendukung dalam menjalankan program ini.

5. Untuk indikator Lingkungan, Ekonomi, Sosial dan Politik dengan item penilaian pengaruh positif dan pengaruh negative di lingkungan sekitar, dari keseluruhan hasil yang diperoleh ialah cukup terlaksana. Program ini sangat berpengaruh di lingkungan sekitar, pengaruh positif seperti dari segi ekonomi dimana dengan menggunakan jaringan gas tersebut akan lebih meringankan pengeluaran, dan tidak sulit juga dalam mencari gas yang dimana pada saat ini sudah mulai langka.
6. Untuk indikator Disposisi Implementor yang dimana memiliki item penilaian respon implementor terhadap kebijakan dan pemahamannya terhadap kebijakan, dari keseluruhan hasil yang diperoleh ialah cukup terlaksana. Dimana para pelaksana telah merespon kebijakan dengan baik dan telah memahami kebijakan, dan berusaha melaksanakan kinerja untuk program ini sebaik-baiknya dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang peneliti buat dari keseluruhan hasil yang telah didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Demi telaksananya program jaringan gas rumah tangga dengan baik, peneliti mengharapkan kepada para pelaksana program agar lebih selektif lagi dalam memilih peralatan yang akan digunakan dalam melaksanakan pembangunan, agar ketika selesai melakukan pembangunan masyarakat dapat menikmati jaringan gas tersebut dengan baik. Dan saran penulis untuk

teknisi jika melakukan perbaikan di rumah masyarakat agar tidak melakukan pungutan biaya sesuai dengan aturan yang ada.

2. Peneliti juga mengharapkan kepada pemerintah agar dapat melakukan sosialisasi secara baik dan menyeluruh lagi, agar seluruh masyarakat dapat mengetahui tentang program tersebut sehingga tidak ada lagi masyarakat yang ragu atau menolak untuk program tersebut.
3. Dan untuk dampak di lingkungan sekitar peneliti juga berharap agar pelaksana pembangunan lebih memperhatikan lagi dampak di lingkungan sekitarnya seperti pada penggalian jalan dan pembuatan lubang pada rumah masyarakat agar dapat diperbaiki lagi dengan baik sehingga masyarakat tidak merasa terganggu.
4. Untuk peneliti selanjutnya yang akan mengangkat topic yang sama, sekiranya dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan terhadap permasalahan yang akan diteliti.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 2016. *Analisis Kebijakan*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Anggara, Sahya, 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung; CV Pustaka Setia.
- Agustino, Leo, 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Andry, Hendry. 20015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Buku *Pembangunan Jaringan Gas Bumi Untuk Rumah Tangga oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi*, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- Duun, N William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Edy, Sutrisno, 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Kharisma Putra Utama.
- Fahmi, Irham. 2013. *Perilaku Organisasi. Teori, Aplikasi, Dan Kasus*. Bandung; Alfaberta.
- Hamim, Sufian, 2005. *Administrasi, Organisasi, Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- Handoko, T, Hani. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, PT.BPFE, Yogyakarta.
- Hasibuan, Melayu SP. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta; STIA LAN Press.
- Heena, Aime, 2010. *Manajemen Strategis Keorganisasian Publik*. Bandung, PT Refika Aditama.
- Indiahino, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik*, Yogyakarta, Gava Media.
- Kusdi, 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta, Salemba Humanika.
- Mulyadi Deddy, Prof Dr, M.Si. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfaberta

- Mooney, D, James. *Konsep Pengembangan Organisasi Publik*. 1996. Bandung;Sinar Baru Algesindo.
- Nugroho D, Riant, 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta. PT.Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung; Alfabeta.
- Ramdhani, Abdullah dan Muhammad Ali Ramdhani. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. (12 halaman), diakses, 09 Januari 2018, jam 04.34,
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suharno.2016.*Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian, Proses dan Analisis Kebijakan*.Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik: Konsep dan Perkembangan Ilmu Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Siagian, Sondang P, 2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P, 2014. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Syafie, Kencana, Inu, Drs. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Syafri, Wirman, 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jatinangor, Penerbit Erlangga.
- Tahir, Arifin, 2015. *Kebijakan Publik & Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung, Alfabeta.
- Terry R. George, 2013. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Saworaya, Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah. 2005. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar Dan Aplikasinya*.Jakarta; Raja Gifando Persada.
- Winarno, Budi 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yokyakarta: PT Media Pressindo.
- Wedayanti, Made Devi. 2018. *Manajemen Corporate Social Responsibility*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

Zulkifli. 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

Dokumentasi

1. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
2. Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun ole Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Gas Bumi Pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.